



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Pre-eliminary

PROVINSI JAMBI

**Triwulan III
2021**



KANWIL *DITJEN*
PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAMBI

SIGINAI
SInerGI meNJAgA Integritas

Tim KFR Kanwil DJPb Provinsi Jambi

Penanggung Jawab :

Supendi

Ketua Tim :

Setyo Budi Pramono

Pengumpul Data :

Arwin Fathurrakhman

Eko Setiyo Utomo

Validator dan Kompilasi Data :

Bayu Setiawan Yuniarto

Murtadlo

Olah Data :

Muhammad Romi Kurniawan

Achmad Shafiq Bafadhal

M. Telly Anggara Saputra

Allyza Nur Amalia

Analisis dan Editor :

Lilik Kurniawan

Bernand Situmorang

Deni Rusdijaman

Parlindungan Manurung

Layout dan Finishing :

Irwan Wahyu Basuki

Faiz Sungkar

Muhammad Ichwan Erfit



SUPENDI

Kepala Kantor Wilayah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia dari-Nya kita dapat menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional Provinsi Jambi *Preeliminatory* untuk Triwulan III Tahun 2021 ini. Kajian ini merupakan salah satu *output* unggulan dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dengan harapan dapat menjadi sebuah masukan terhadap kebijakan pembangunan perekonomian khususnya di Provinsi Jambi.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun yang menyelesaikan laporan ini. Dan tak luput pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi yang secara aktif turut mendukung penyelesaian laporan ini. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi yang telah banyak membantu penyusunan kajian ini.

Selanjutnya kami juga mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada kajian ini. Tentunya kami selalu terbuka terhadap segala kritik, saran dan masukan agar kajian ini dapat lebih baik dan lebih bermanfaat lagi ke depan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini.

*Sore-sore enaknyanya cari cemilan
Apalagi ada segelas kopi
KFR Preeliminatory ini kami siapkan
Sebagai gambaran fiskal di Provinsi Jambi*

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jambi, 29 Oktober 2021
Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi



Supendi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DASHBOARD	vi
EXECUTIVE SUMMARY	vii
BAB I. ANALISIS EKONOMI REGIONAL	1
1.1. Perkembangan dan Analisis Indikator Makro Ekonomi	1
1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	1
1.1.2. Inflasi	2
1.2. Perkembangan dan Analisis Indikator Kesejahteraan	3
1.2.1. Kemiskinan	3
1.2.2. Pengangguran	3
1.2.3. Ketimpangan Pendapatan	4
1.2.4. Nilai Tukar Petani (NTP).....	5
1.2.5. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	5
BAB II. ANALISIS FISKAL REGIONAL	6
2.1. Pelaksanaan APBN	6
2.1.1. Pendapatan Negara	7
2.1.2. Belanja Negara.....	8
2.1.3. Surplus/Defisit	11
2.1.4. Prognosis APBN.....	11
2.1.5. Analisis Capaian Output: Layanan Dasar Publik	11
2.2. Pelaksanaan APBD	12
2.2.1. Pendapatan Daerah	13
2.2.2. Belanja Daerah.....	14
2.2.3. Surplus/Defisit	14
2.2.4. Pembiayaan Daerah.....	15
2.2.5. Prognosis APBD.....	15
BAB III. ANALISIS TEMATIK	16
3.1. Peran Fiskal Untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan: Analisis NTP dan NTN	16
3.1.1. Reviu Program Pemerintah untuk Petani dan Nelayan.....	17
3.1.2. Analisis Perbandingan Tren Antara Pengeluaran dengan NTP dan NTN	25
3.1.3. Rekomendasi Kebijakan.....	27
3.2. Analisis Peluang Investasi Daerah	30
3.2.1. Identifikasi Peluang Investasi	30

3.2.2.	Informasi Pasar	33
3.2.3.	Analisis Kelayakan	34
3.2.4.	Faktor yang Berpengaruh terhadap Investasi	36
3.2.5.	Penutup	38
BAB IV.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	45
4.1.	Kesimpulan	45
4.2.	Rekomendasi	47
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 PDRB Jambi Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2021	1
Tabel I-2 PDRB Jambi Menurut Produksi Tahun 2020-2021	1
Tabel I-3 Pergerakan Inflasi Jambi Tahun 2020-2021	2
Tabel I-4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2021	3
Tabel I-5 Pergerakan TPT Jambi Tahun 2020-2021	3
Tabel I-6 Pergerakan Gini Ratio Jambi Tahun 2020-2021	4
Tabel I-7 Pergerakan NTP Jambi Tahun 2020-2021	5
Tabel I-8 Pergerakan NTN Jambi Bulan September Tahun 2020-2021	5
Tabel II-1 Pagu dan Realisasi APBN s.d. Triwulan III Tahun 2021 & 2020	6
Tabel II-2 Rekapitulasi Penerimaan Perpajakan Triwulan III 2021 & 2020	7
Tabel II-3 Rekapitulasi PNBPN Triwulan III 2021 & 2020	7
Tabel II-4 TKDD yang Dibayarkan oleh KPPN di Provinsi Jambi Triwulan III 2021 & 2020	10
Tabel II-5 Perkembangan Surplus/Defisit Provinsi Jambi 2021 & 2020	11
Tabel II-6 Proyeksi APBN pada Prov. Jambi s.d. Triwulan IV Tahun 2021	11
Tabel II-7 Capaian Output Strategis Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Provinsi Jambi Tahun 2021	11
Tabel II-8 Pagu dan Realisasi APBD s.d. Triwulan III TA 2021 & 2020	12
Tabel II-9 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi s.d. Triwulan III Tahun 2021)	15
Tabel III-1 Pagu dan Realisasi Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian di Provinsi Jambi Tahun 2021	18
Tabel III-2 Output Strategis Sektor Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2021	19
Tabel III-3 Output Strategis Sektor Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021	20
Tabel III-4 Output Strategis Sektor Pertanian pada Kementerian PUPR Tahun 2021	20
Tabel III-5 Penyaluran KUR Sektor	21
Tabel III-6 Perbandingan Penyaluran KUR per Sektor Tahun 2020 – 2021	22
Tabel III-7 DAK Fisik Bidang Pertanian dan Perikanan	22
Tabel III-8 Proyeksi Keuntungan	35
Tabel III-9 Simulasi Pembiayaan Proyek Peluang Investasi Daerah untuk Kabupaten Kerinci .	39
Tabel III-10 Rincian Kebutuhan Investasi	41
Tabel III-11 Proforma Arus Kas Masuk	42
Tabel III-12 Proforma Arus Kas Keluar	42
Tabel III-13 Proforma Arus Kas Netto	43
Tabel III-14 Proforma Profitability	44

DAFTAR GRAFIK

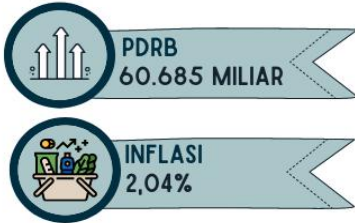
Grafik II-1 Perbandingan Komposisi Pajak- PNBPN Tahun 2021 & 2020	8
Grafik II-2 Komposisi Belanja Pemerintah Pusat dan TKDD Tahun 2021 & 2020	8
Grafik II-3 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2021 & 2020	13
Grafik II-4 Komposisi PAD Tahun 2021 & 2020	13
Grafik II-5 Komposisi Belanja Per Kabupaten	14
Grafik III-1 Perkembangan NTP per Subsektor dan Analisis Tren hingga Akhir Tahun 2021	16
Grafik III-2 Tren Harga yang Dibayar Petani (Ib) terhadap Total Belanja Input Sektor Pertanian	25
Grafik III-3 Tren Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) terhadap Total Belanja Input Sektor Perikanan	26



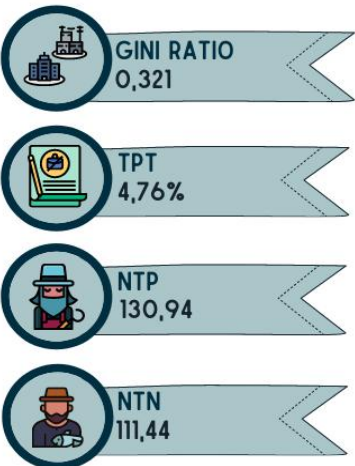
DASHBOARD KEEKONOMIAN PROVINSI JAMBI TRIWULAN III TAHUN 2021



MAKRO EKONOMI



KESEJAHTERAAN



APBN



APBD



CAPAIAN OUTPUT SEKTORAL



Sektor	Pagu	Realisasi	% Rp	Rata-rata % Output	Rata-Rata GAP
Kesehatan	9,77	5,30	47,27%	51,82%	4,56%
Pendidikan	199,87	81,77	41,76%	47,37%	5,62%
Infrastruktur	460,05	249,13	56,99%	63,73%	6,74%
Total	669,68	336,19	50,37%	56,11%	5,73%

ANALISIS TEMATIK

Peran Fiskal untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan

- Fokus sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan serta kestabilan harga.
- Belum menjadi sektor utama yang digenjut pertumbuhannya tahun ini.



Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ini hanya diharapkan tumbuh 2,3% agar mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,77%.

Menjadikan sektor Pertanian ini sebagai sektor prioritas dengan melaksanakan Pengembangan Food Estate dan Kampung Pangan Terpadu.

2021

2022

Analisis Peluang Investasi Daerah



- Potensi sektor pariwisata, pengembangan Danau Kerinci.
- Sebagai tempat rekreasi air atau melakukan aktivitas lainnya seperti makan makanan khas Kabupaten Kerinci.
- Skema investasi langsung dalam bentuk pemberian pinjaman.

Analisis untuk investasi selama 10 tahun:
NPV sebesar 12.086,84
BCR sebesar 1,32
IRR sebesar 24,49%
Payback Period hanya 4,68 tahun atau 4 tahun 9 bulan.



EXECUTIVE SUMMARY

PDRB
60.685,23 Miliar

**Pertumbuhan
Ekonomi**
5,91% (y-on-y)

Gini Ratio
0,321

Inflasi
2,04% (y-o-y)

TPT
4,76%

NTP
130,94

NTN
111,44

Pada Triwulan III ini pertumbuhan perekonomian Provinsi Jambi sudah memiliki capaian yang cukup baik. Pada periode ini Provinsi Jambi berhasil keluar dari jurang resesi dan membukukan pertumbuhan 5,91% (y-on-y) dengan total PDRB sebesar 60.685,23 Miliar. Tantangan yang masih harus diselesaikan adalah bagaimana membuka lapangan kerja baru karena tingkat pengangguran terbuka saat ini masih cukup tinggi di angka 4,76% dari target 2,8%. Selain itu, Gini Ratio juga sedikit mengalami peningkatan menjadi 0,321 dari sebelumnya 0,316. Padahal Gini Ratio ditargetkan hanya di angka 0,3. Namun berita baiknya tingkat inflasi masih sangat terjaga dengan di level 2,04% dari target 3% yang telah ditetapkan dan nilai ini sedikit diatas tingkat inflasi Nasional yang berada di angka 1,6%. Selain itu, nilai tukar petani juga terus mengalami perbaikan dan meningkat di level 130,94 jauh berada NTP Nasional yang hanya 105,71. Nilai Tukar Nelayan juga mengalami perbaikan di angka 111,44 jauh diatas NTN Nasional yang hanya 105,60.

**Total
Pendapatan**
4.202,59 Miliar

Total Belanja
14.490,49 Miliar

Defisit
10.287,90 Miliar

Peran belanja pemerintah pada periode ini mulai memperlihatkan pertumbuhan yang menggembirakan. Meskipun Pendapatan Negara turun 13,07% dari tahun lalu menjadi 4.202,59 Miliar (78,86%), namun capaiannya terhadap target sangat baik. Capaian penerimaan perpajakan periode ini telah mencapai 3.649,90 Miliar (72,06%) dan PNBPN mencapai 552,69 Miliar (209,04%) sehingga total penerimaan telah mencapai 4.202,59 Miliar (78,86%).

Sedangkan dari sisi belanja meskipun pertumbuhannya turun sebesar 5,86% dari tahun lalu 14.490,49 Miliar (70,83%), namun capaiannya terhadap pagu cukup baik. Tercatat realisasi belanja mencapai 14.490,49 Miliar (70,83%) dengan rincian Belanja Pegawai sebesar 1.913,09 Miliar (77,07%), Belanja Barang sebesar 1.615,52 Miliar (60,27%), Belanja Modal sebesar 1.012 Miliar (53,46%), Belanja Bansos sebesar 6,02 Miliar (37,49%), Belanja Hibah sebesar 2,46 Miliar (8,99%), Transfer ke Daerah sebesar 9.055,52 Miliar (74,60%) dan Dana Desa sebesar 885,89 Miliar (72,49%). Belanja Modal menjadi belanja dengan pertumbuhan signifikan pada periode ini dan memberikan kontribusi yang cukup besar.

Dengan capaian pendapatan dan belanja tersebut, APBN mengalami defisit sebesar 10.287,90 Miliar. Defisit ini turun 2,55% dari tahun lalu yang mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan Provinsi Jambi terhadap daerah lain sedikit berkurang.

**Total
Pendapatan**
11.162,13 Miliar

Total Belanja
9.495,92 Miliar

Surplus
1.666,20 Miliar

**Pembiayaan
Netto**
691,65 Miliar

Hal senada juga dialami pada APBD. Pertumbuhan Realisasi APBD juga mengalami penurunan dari tahun lalu sebesar 8% menjadi 11.162,13 Miliar (62%). Namun kabar baiknya, capaian PAD meningkat 14% dengan total sebesar 2.010,35 Miliar (69%). Sementara untuk pendapatan transfer juga turun 13% dengan total sebesar 9.043,57 Miliar (62%). Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meskipun mengalami kenaikan sangat besar dengan total 108,21 Miliar (23%) namun karena porsinya yang sangat kecil sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan.

SILPA
2.357,86 Miliar

Sementara itu, disisi belanja tidak mengalami penurunan yang berarti dengan penurunan hanya 3% menjadi 9.495,92 Miliar (50%). Belanja Operasi hampir sama dengan tahun lalu dengan penurunan hanya 4% dengan total 6.812,71 Miliar (54%) dan Belanja Modal turun 2% dengan total 1.332,57 Miliar (43%). Sementara Belanja Tak Terduga menjadi belanja yang mengalami penurunan terbesar yaitu -68% dengan capaian hanya 74,34 Miliar (13%). Untuk Belanja Transfer mengalami pertumbuhan 14% dengan capaian total sebesar 1.276,30 Miliar (32%). Dengan capaian Pendapatan dan Belanja tersebut, APBD mengalami surplus sebesar 1.666,20 Miliar. Surplus ini turun 29% dari tahun lalu yang disebabkan lambannya realisasi belanja padahal capaian PAD tumbuh cukup baik. Surplus itu kemudian ditambah lagi dengan Pembiayaan Netto sebesar 691,65 Miliar yang sebagian besar berasal dari SILPA tahun lalu sehingga pada periode ini APBD memiliki SILPA sebesar 2.357,86 Miliar.

Kajian Tematik I

Peran Fiskal Untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Tahun 2021 Pemerintah Daerah lebih memfokuskan sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan yaitu dari ketersediaan beras, jagung dan kedelai serta kestabilan harga untuk komoditas yang mempunyai pengaruh besar terhadap inflasi seperti cabai dan bawang merah. Usaha ini dapat dikatakan berhasil jika melihat tren inflasi yang tetap terjaga hingga triwulan III tahun 2021 ini bahkan masih sangat aman dari tingkat inflasi yang ditargetkan 3%.

Selain itu, jika kita lihat arah dan prioritas Pemerintah saat RKPD untuk tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jambi masih belum menjadikan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai prioritas utama untuk digenjot pertumbuhannya pada tahun ini. Jika dibandingkan sektor-sektor lain, terlihat bahwa sektor ini meskipun menjadi perhatian Pemerintah Daerah namun bukan menjadi sektor yang menjadi prioritas. Pada tahun 2021 ini, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ini hanya diharapkan tumbuh 2,3% agar mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,77%.

Meskipun begitu, melihat geliat sektor pertanian yang terus membaik serta ketahanannya yang sangat tinggi bahkan ditengah kondisi pandemi, Pemerintah Provinsi Jambi telah membuat kebijakan di tahun 2022 untuk menjadikan sektor Pertanian ini sebagai sektor prioritas. Salah satu Program yang akan dilaksanakan adalah Pengembangan *Food Estate* dan Program Kampung Pangan Terpadu dengan tujuan untuk memandirikan petani secara makro. Perhatian khusus dari Pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani ke depan disamping mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dengan meningkatnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB Provinsi Jambi.

Kajian Tematik II

Peluang Investasi Daerah

Untuk peluang investasi daerah yang akan diangkat kali ini adalah potensi sektor pariwisata yaitu pengembangan Danau Kerinci. Keunikan budaya yang terus diperkenalkan melalui “Festival Danau Kerinci” sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga terakhir untuk tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 7-9 November yang lalu. Kawasan di sekitar Danau Kerinci memiliki potensi untuk berbagai aktifitas. Tempat ini dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi air yang

menarik untuk memancing, berenang, berkemah, atau melakukan aktivitas lainnya seperti makan makanan khas Kabupaten Kerinci di restoran-restoran di sekitar Danau Kerinci.

Dari hasil analisis kelayakan diketahui bahwa proyek ini layak dan menguntungkan. Hal ini tercermin dari analisis untuk investasi selama 10 tahun diperoleh Net Present Value (NPV) sebesar 12.086,84, Benefit/Cost Ratio sebesar 1,32, Internal Rate of Return (IRR) sebesar 24,49% jauh diatas asumsi yang digunakan yaitu hanya 12% serta Payback Period hanya 4,68 tahun atau 4 tahun 9 bulan. Dengan analisis awal serta mempertimbangkan catatan historis pembiayaan pada Pemkab Kerinci, proyek ini dapat dilaksanakan dengan skema investasi langsung dalam bentuk pemberian pinjaman.

Rekomendasi

Untuk Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan, kami memberikan rekomendasi:

a) Sanksi terhadap Pelanggar Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

Kami merekomendasikan agar Pemerintah membuat penyesuaian atas kebijakan harga dan membuat sanksi yang jelas bagi pelanggar. Dengan adanya pemberian sanksi ini diharapkan kebijakan harga yang dibuat dapat memberikan jaminan bagi petani agar hasil panennya mendapatkan harga yang layak. Selain itu, dengan adanya sanksi ini dapat menjadi *benchmark* bagi Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap komoditas penting lainnya seperti jagung, kedelai, cabai merah dan bawang merah yang memiliki dampak besar terhadap inflasi di Provinsi Jambi.

b) Peningkatan Edukasi Bisnis Pertanian

Kami merekomendasikan agar para petani diberikan wawasan bisnis yang cukup agar kedepannya para petani dapat menjaga komitmen bisnis serta mampu melihat berbagai peluang-peluang yang ada salah satunya dengan memanfaatkan pasar digital yang sedang menjamur saat ini. Pemerintah Daerah juga dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar para petani diberikan edukasi inklusi keuangan yang cukup agar tingkat literasi keuangan para petani semakin meningkat. Tingkat literasi keuangan yang tinggi tentunya akan mempermudah petani untuk memperoleh pendanaan maupun memperoleh kemudahan dengan banyaknya metode pembayaran yang tersedia saat ini.

c) Pengalokasian Dana Cadangan Khusus Pertanian

Kami merekomendasikan agar pemerintah membuat kebijakan khusus untuk mengalokasikan secara tetap terkait pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Hal ini didasarkan bahwa sektor ini merupakan komponen terbesar pembentuk PDRB Provinsi Jambi dan secara konsisten memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian. Kami mendorong agar Pemerintah membuat kebijakan yang mendukung perkembangan para petani di Daerah. Salah satunya dengan menyediakan dana cadangan khusus yang dipersiapkan untuk membeli hasil pertanian yang tidak laku dipasaran baik karena maraknya bantuan sosial yang diberikan maupun karena sebab-sebab lain seperti tingginya impor, musim panen raya yang bersamaan dan hal-hal lain sebagainya.

d) Perluasan Pasar dan Promosi

Kami merekomendasikan agar pemerintah turut serta dalam menyediakan demand tersebut baik melalui kebijakan di Internal maupun eksternal. Selain itu, dapat juga diberikan bantuan promosi serta mengadakan kegiatan pameran dagang, festival tani nelayan atau event tertentu yang dapat menjadi trigger bagi komoditas hasil pertanian dari Provinsi Jambi.

e) Alokasi dan Eksekusi Anggaran Berbasis Data (*Data Driven*)

Kami merekomendasikan agar kebijakan pengalokasian dana yang tersedia berbasis data dan informasi pertanian/perikanan. Misalnya alokasi dana untuk penyuluh pertanian difokuskan pada desa yang menjadi sentra produksi dan penghasil komoditi, serta pengembangan varietas unggul tanaman hortikultura yang memiliki pangsa pasar yang potensial. Di samping itu, *timing* eksekusi/realisasi anggaran agar memperhatikan kondisi ekonomi regional, inflasi, ketersediaan stok pangan, kondisi pasar komoditi, serta perkembangan harga komoditi level global. Salah satu peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku Regional Chief Economist yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemda adalah forum Aset Liability Committee (ALCO) Regional.

f) Pemanfaatan Jasa Resi Gudang

Pemerintah dapat melindungi petani dari perubahan harga yang berfluktuatif dengan memanfaatkan lembaga penjaminan resi gudang. Melalui sistem resi gudang, petani tidak harus menjual komoditasnya pada saat panen. Komoditas hasil panen dapat disimpan terlebih dahulu di dalam gudang dan baru dijual ketika harganya lebih kompetitif. Di samping itu resi Gudang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank dengan skema subsidi bunga yang memungkinkan petani memperoleh pendanaan untuk memulai kembali usaha taninya.

BAB I. ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1. Perkembangan dan Analisis Indikator Makro Ekonomi

1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB menurut Pengeluaran

Tabel I-1 PDRB Jambi Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2021

Jenis Pengeluaran	2021	2020	Y-to-Y	Q-to-Q	Porsi
Rumah Tangga	25.254,89	24.051,21	2,59	-0,96	42%
LNPRT	329,25	318,07	1,39	-0,65	1%
Pemerintah	4.614,74	4.788,82	-2,82	-6,37	8%
PMTB	12.513,09	11.436,80	7,36	0,13	21%
Inventori	536,54	1.134,89	0,00	0,00	1%
Ekspor	39.090,58	29.722,18	15,71	7,87	64%
Impor	21.653,86	20.169,95	15,64	3,46	36%
PDRB menurut Pengeluaran	60.685,23	51.282,01	5,91	2,73	

Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah)

Target

Pertumbuhan
Ekonomi 2021
4,77%

Struktur Perekonomian Provinsi Jambi dari sisi pengeluaran untuk tahun 2021 mengindikasikan terjadinya pergerakan ekonomi menuju *recovery*. Hal ini sangat terlihat dari porsi belanja Rumah Tangga yang sangat besar dengan pertumbuhan y-on-y yang cukup besar. Belanja rumah tangga yang meningkat ini menjadi indikasi positif bahwa daya beli masyarakat telah berangsur normal sehingga dapat kembali mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Hal yang cukup menggembirakan juga terjadi untuk kelompok ekspor yang tumbuh dan memberi porsi cukup besar pada periode ini. Peningkatan pada ekspor ini terjadi karena dipengaruhi oleh harga pasaran dunia khususnya untuk komoditas unggulan seperti sawit dan batubara yang mengalami peningkatan harga cukup besar di Pasar Internasional.

Namun hal yang kurang menggembirakan justru terjadi pada belanja Pemerintah. Belanja Pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDRB yang turun secara y-on-y. Hal ini menunjukkan penurunan tingkat belanja pemerintah dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini disebabkan turunnya belanja pemerintah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD yang akan dijelaskan lebih lanjut pada BAB II KFR ini.

PDRB menurut Sektor Lapangan Usaha

Tabel I-2 PDRB Jambi Menurut Produksi Tahun 2020-2021

Periode	2021	2020	Y-to-Y	Q-to-Q	Porsi
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.771,08	16.069,37	1,37	6,72	33%
Pertambangan dan Penggalian	9.167,06	5.713,77	11,67	9,58	15%
Industri Pengolahan	6.415,66	5.613,58	0,82	3,79	11%
Pengadaan Listrik dan Gas	42,27	39,48	3,40	6,08	0%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	83,66	77,50	0,94	6,60	0%
Konstruksi	4.440,37	4.035,12	1,60	6,16	7%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.375,31	6.440,83	1,79	9,42	12%

Transportasi dan Pergudangan	1.522,57	1.410,63	5,76	6,30	3%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	616,12	622,07	-3,51	-1,59	1%
Informasi dan Komunikasi	2.411,97	2.285,49	0,97	4,93	4%
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.536,94	1.373,58	1,91	5,60	3%
Real Estate	962,72	916,55	5,77	1,20	2%
Jasa Perusahaan	713,07	642,00	3,27	5,19	1%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.223,71	2.762,89	-25,87	-16,78	4%
Jasa Pendidikan	1.977,42	2.044,36	-6,99	-5,60	3%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	904,91	721,43	19,68	22,84	1%
Jasa lainnya	520,38	513,38	-1,48	1,02	1%
PDRB	60.685,23	51.282,01	2,73	5,91	

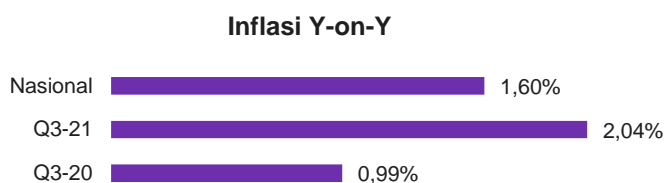
Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah)

Sedangkan dari sisi Produksi, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih tetap menjadi andalan sektor produksi dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 32% dengan laju pertumbuhan sebesar 5,89% (y-on-y). Sektor ini cukup stabil dan terus menunjukkan tren perbaikan seiring dengan stabilnya harga dan peningkatan produksi kelapa sawit, serta peningkatan yang signifikan pada produksi dan ekspor pinang dan kopi.

Sementara itu, sektor Industri Pengolahan masih mengalami stagnasi selama 20 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena masih minimnya perkembangan hilirisasi untuk produk komoditas unggulan sehingga produksi masih sebatas menghasilkan bahan mentah. Padahal Provinsi Jambi yang sudah jelas memiliki komoditas unggulan harusnya memiliki hilirisasi sendiri sehingga dapat memberikan nilai tambah atas bahan mentah yang dihasilkan. Selain itu adanya hilirisasi ini mempunyai peran strategis karena akan berpengaruh langsung terhadap tingkat pengangguran dan juga tingkat kemiskinan karena akan mampu membuka lapangan kerja dan memberikan nilai tambah produksi.

1.1.2. Inflasi

Tabel I-3 Pergerakan Inflasi Jambi Tahun 2020-2021



Inflasi	Q3-20	Q3-21	Nasional
C-to-C	0,96%	0,01%	0,80%
Y-on-Y	0,99%	2,04%	1,60%

Sumber : BPS Provinsi Jambi (data diolah)

Target

Inflasi 2021
3,0%

Tingkat inflasi secara y-on-y mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi peningkatan pada konsumsi rumah tangga yang meningkatkan sisi permintaan sehingga mempengaruhi harga di pasar. Salah satu yang menjadi pemicu inflasi yang paling berpengaruh adalah hari besar keagamaan. Maka dari itu, dibutuhkan strategi yang tepat ketika masa-masa mendekati hari besar keagamaan untuk menjaga sisi suplai agar tidak terjadi lonjakan harga. Salah satu yang sedang digalakkan untuk menjaga tingkat inflasi ini adalah pelaksanaan *interregional trading*. Kebijakan ini diharapkan akan mampu menjaga menstabilkan harga dengan cara menjaga sisi penawaran terutama ketika ada suatu Kabupaten yang mengalami surplus

komoditas. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tidak terjadi deflasi yang besar ketika suplai yang terlalu besar dan tidak terjadi inflasi yang besar ketika barang langka karena ketersediaan barang selalu terjaga.

1.2. Perkembangan dan Analisis Indikator Kesejahteraan

1.2.1. Kemiskinan

Tabel I-4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2021



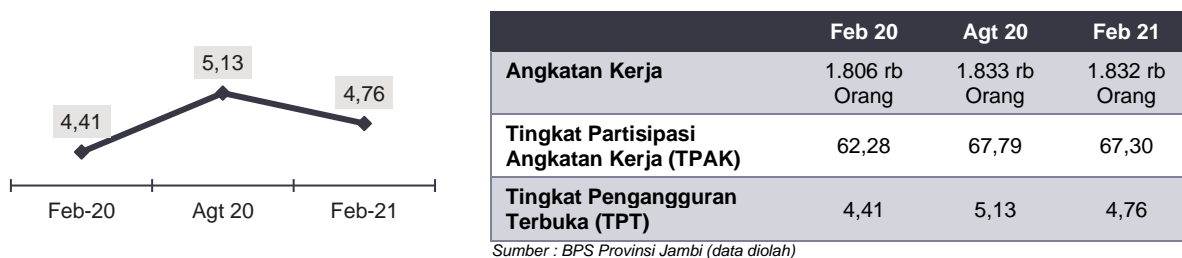
Ditinjau dari sisi penyebab kemiskinan, sumbangan penyebab garis kemiskinan sangat dipengaruhi dari faktor makanan. Untuk periode Maret-2021 ini, faktor makanan berperan 76,10% terhadap kemiskinan, sementara sisanya 23,90% dari non makanan. Pada periode ini, harga beras mengalami sedikit penurunan namun sayangnya barang makanan lainnya seperti cabai, bawang dan gula pasir mengalami peningkatan sehingga membuat tingkat kemiskinan pada periode ini mengalami peningkatan.

Jika dibandingkan tingkat kemiskinan regional Sumatera, Provinsi Jambi masih menempati peringkat 5 dari 10 Provinsi di Sumatera dimana rata-rata tingkat kemiskinan Regional Sumatera adalah 9,82%. Dengan kata lain, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi masih cukup rendah dan berada di bawah rata-rata Regional Sumatera. Sedangkan jika dibandingkan secara Nasional, Provinsi Jambi juga masih cukup baik dengan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata Nasional yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 10,14%.

Dalam 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan Provinsi Jambi selalu berada pada rentang 7% - 9%. Stagnasi tingkat kemiskinan ini disebabkan masih kurangnya edukasi bisnis dan inklusi keuangan masyarakat sehingga program-program yang dijalankan Pemerintah juga belum banyak membuahkan hasil. Selain itu, rendahnya tingkat edukasi bisnis dan tata niaga juga turut mempengaruhi stagnasi ini sehingga kondisi usaha ataupun produksi hanya tergantung bagaimana harga dipasaran tanpa adanya kemampuan untuk melakukan intervensi ataupun strategi mitigasi mengenai apa yang harus dilakukan ketika kondisi pasar berubah.

1.2.2. Pengangguran

Tabel I-5 Pergerakan TPT Jambi Tahun 2020-2021



Target
TPT 2021
2,8

Tingkat Pengangguran Terbuka pada periode ini masih cukup jauh dari target. Meskipun begitu, terlihat bahwa mulai terjadi penurunan dari periode sebelumnya. Penurunan ini seiring dengan kembalinya aktivitas perekonomian sehingga kembalinya lapangan kerja. Pada periode ini, terjadi penurunan pada pekerja setengah pengangguran sebesar 2,32% dan pekerja paruh waktu sebesar 3,89%. Sementara itu jumlah pekerja yang terdampak COVID juga mulai mengalami penurunan dari 252 ribu menjadi hanya 147 ribu. Penurunan ini menunjukkan bahwa banyak pekerja yang sebelumnya menganggur karena COVID sekarang sudah mulai kembali bekerja. Hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan jumlah penduduk bekerja dengan hanya 4 sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor Perdagangan, Transportasi, Pertambangan dan Jasa Lainnya. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, peningkatan jumlah pengangguran paling banyak dialami oleh kaum wanita. Jika dibandingkan tahun lalu, pertumbuhannya cukup signifikan bahkan hampir 1,5 kali lipat dari february 2020. Sementara untuk laki-laki cenderung mengalami penurunan bahkan sudah lebih baik dari Februari 2020. Fenomena-fenomena ini salah satunya disebabkan karena terdapat beberapa sektor yang masih terdampak COVID karena pembatasan aktivitas masih memiliki proses *recovery* yang lebih lambat dari sektor lainnya. Salah satu yang menjadi isu utama pengangguran adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Jika dilihat dari sisi latar belakang pendidikan, kebutuhan yang paling besar adalah terhadap tenaga teknis seperti lulusan D1/D3 atau lulusan-lulusan dengan latar belakang pendidikan vokasi/politeknik. Sementara itu, lulusan yang banyak tersedia adalah dari Sarjana/S1 dari berbagai jurusan yang justru tidak memiliki jumlah permintaan tinggi di pasar. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran di level pendidikan tersebut cukup besar dan memiliki sumbangan pengangguran tertinggi di Provinsi Jambi.

1.2.3. Ketimpangan Pendapatan

Tabel I-6 Pergerakan Gini Ratio Jambi Tahun 2020-2021



Sumber : BPS Provinsi Jambi (data diolah)

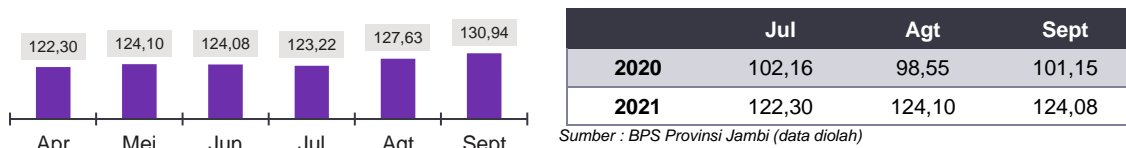
Target
Gini Ratio 2021
0,3

Pada Maret 2021, *Gini Ratio* tercatat sebesar 0,321. Angka ini meningkat 0,005 poin jika dibandingkan dengan September 2020 sebesar 0,316. Sama seperti mengukur tingkat kemiskinan, *Gini Ratio* juga dapat dihitung berdasarkan tempat tinggal yaitu perkotaan dan pedesaan. Daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,354 naik dibanding September 2020 yang sebesar 0,346. Sedangkan di pedesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,288 turun dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 0,289.

Jika dibandingkan dengan Nasional, gini ratio Provinsi Jambi masih berada dibawah rata-rata. Sementara di Regional Sumatera, hanya lebih baik dibandingkan Sumut, Sumbar dan Babel. Tingkat ketimpangan yang cenderung masih cukup tinggi ini perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya pemerintah daerah agar pemerataan kesejahteraan dapat dilakukan.

1.2.4. Nilai Tukar Petani (NTP)

Tabel I-7 Pergerakan NTP Jambi Tahun 2020-2021

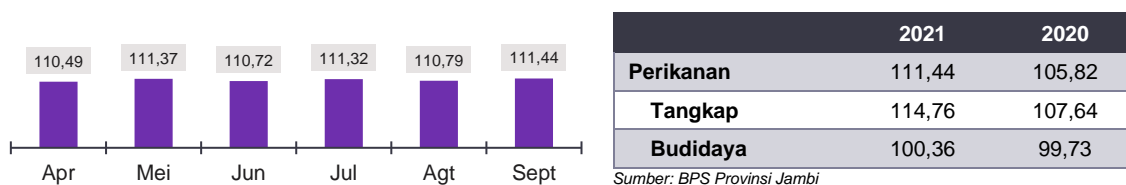


Sektor yang menarik pada periode ini adalah peternakan yang sebelumnya rendah kini telah melebihi 100 poin. Hal ini dipicu perayaan hari raya Idul Adha dimana permintaan atas hewan ternak seperti kambing dan sapi yang akan dijadikan hewan Qurban mengalami peningkatan. Beberapa sektor lain masih belum mampu menembus angka di atas 100. Sektor-sektor tersebut antara lain tanaman pangan dengan NTP 97,44 dan Hortikultura dengan NTP 97,32. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya harga jual yang tidak bersaing sehingga membuat sektor ini cukup lemah. Selain itu sulitnya akses dan distribusi serta lemahnya pasar yang dipengaruhi oleh rendahnya edukasi bisnis dan tata niaga juga semakin membuat sektor ini semakin lemah. Lebih lanjut terkait hal ini akan di bahas pada Bab 3 Kajian ini.

NTP selama 2 tahun terakhir terus menunjukkan tren perbaikan dan peningkatan. Kenaikan NTP ini salah satunya disebabkan perbaikan harga pada komoditas unggulan khususnya pada sektor Tanaman Perkebunan Rakyat baik pada sawit, pinang dan kopi sejak Agustus tahun 2020. Sayangnya peningkatan pada sektor ini belum diikuti dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk sehingga hasil yang diberikan belum maksimal. Selain itu, rendahnya tingkat edukasi dan tata niaga bisnis disektor ini akan membuat tingkat NTP akan sangat ditentukan oleh harga pasaran komoditas sehingga membuat tingkat kesejahteraan petani sangat labil.

1.2.5. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Tabel I-8 Pergerakan NTN Jambi Bulan September Tahun 2020-2021



NTN terus menunjukkan tren perbaikan dan peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi baik untuk perikanan tangkap maupun budidaya. Hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa pada Triwulan III tahun ini terlihat bahwa perikanan budidaya mulai menunjukkan perkembangan yang baik dimana para pelaku usaha perikanan mulai dapat menikmati hasil budidaya ikannya.

Salah satu isu utama diperikanan adalah masih tingginya biaya produksi karena terjadinya pasar oligopoli khususnya untuk pakan. Jumlah penyedia yang terbatas mengakibatkan harga pakan diatur secara bebas dan dapat meningkat tajam ketika kondisi tertentu. Rendahnya intervensi pemerintah dalam hal ini juga memicu para pengusaha di sektor ini juga sulit untuk meningkatkan kesejahteraan karena hasil produksi hanya cukup untuk sekedar menutupi biaya namun belum dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi pelaku usahanya.

BAB II. ANALISIS FISKAL REGIONAL

2.1. Pelaksanaan APBN

Berikut merupakan / Account APBN di Provinsi Jambi Tahun 2021:

Tabel II-1 Pagu dan Realisasi APBN s.d. Triwulan III Tahun 2021 & 2020

(dalam Miliar Rupiah)

	TA 2021			TA 2020			% Growth
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
A. Pendapatan Negara	5.329,62	4.202,59	78,85%	5.622,76	4.834,61	85,98%	-13,07%
I. Penerimaan Dalam Negeri	5.329,62	4.202,59	78,85%	5.622,76	4.834,61	85,98%	-13,07%
1. Penerimaan Pajak	5.065,22	3.649,90	72,06%	5.205,72	4.227,32	81,21%	-13,66%
2. PNBPNBP	264,40	552,69	209,04%	417,04	607,28	145,62%	-8,99%
B. Belanja Negara	20.459,44	14.490,49	70,83%	20.570,43	15.391,91	74,83%	-5,86%
I. Belanja Pemerintah Pusat	7.099,24	4.549,08	64,08%	6.576,43	3.969,00	60,35%	14,62%
1. Belanja Pegawai	2.482,16	1.913,09	77,07%	2.521,40	1.838,23	72,91%	4,07%
2. Belanja Barang	2.680,54	1.615,52	60,27%	2.862,46	1.530,28	53,46%	5,57%
3. Belanja Modal	1.893,15	1.012,00	53,46%	1.175,92	592,54	50,39%	70,79%
4. Belanja Bansos	16,05	6,02	37,49%	16,65	7,95	47,75%	-24,30%
5. Belanja Hibah	27,33	2,46	8,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	13.360,20	9.941,41	74,41%	13.994,00	11.422,92	81,63%	-12,97%
1. Transfer ke Daerah	12.138,06	9.055,52	74,60%	12.787,28	10.462,43	81,82%	-13,45%
Dana Bagi Hasil	1.268,86	1.083,55	85,40%	1.782,94	1.324,09	74,26%	-18,17%
Dana Alokasi Umum	7.402,17	5.947,07	80,34%	7.532,46	6.330,90	84,05%	-6,06%
DAK Fisik	1.178,61	423,27	35,91%	1.100,86	1.042,57	94,71%	-59,40%
DAK Non Fisik	2.026,58	1.426,64	70,40%	2.012,94	1.451,88	72,13%	-1,74%
Dana Insentif Daerah	261,84	174,99	66,83%	358,08	312,98	87,41%	-44,09%
2. Dana Desa	1.222,14	885,89	72,49%	1.206,72	960,48	79,59%	-7,77%
C. Surplus/Defisit	-15.129,82	-10.287,90	68,00%	-14.947,67	-10.557,31	70,63%	-2,55%
SILPA/SIKPA	-15.129,82	-10.287,90	68,00%	-14.947,67	-10.557,31	70,63%	-2,55%

Sumber: OM SPAN; SIMTRADA; KPP Lingkup Provinsi Jambi; KPPBC Provinsi Jambi (data diolah berdasarkan cut off tanggal 15 Oktober 2021)

Capaian Pendapatan Negara pada periode ini mengalami penurunan cukup tajam dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi khususnya karena penurunan pada penerimaan perpajakan dalam Negeri. Sementara untuk Pajak Internasional sudah melebihi dari target untuk triwulan ini. Hal senada juga ditunjukkan dari capaian PNBPNBP yang turun dari tahun sebelumnya.

Dari sisi belanja juga sedikit mengalami penurunan tahun sebelumnya. Penurunan ini terlihat disebabkan rendahnya realisasi TKDD akibat adanya relaksasi pada tahun sebelumnya Padahal capaian TKDD secara umum sudah mencapai target untuk tahun ini yaitu lebih dari 70%.

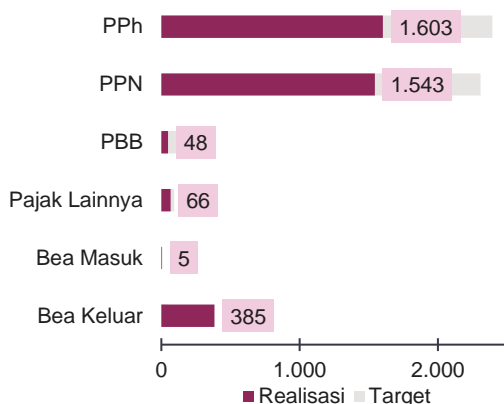
Lebih jelasnya, detil masing-masing kategori tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

2.1.1. Pendapatan Negara

2.1.1.1. Penerimaan Perpajakan

Tabel II-2 Rekapitulasi Penerimaan Perpajakan Triwulan III 2021 & 2020

(dalam Miliar Rupiah)



Jenis Pajak	2021		2020		Growth
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
PPh	2.395,70	1.602,62	2.227,78	2.001,27	-19,92%
PPN	2.305,91	1.543,10	1.996,52	1.966,76	-21,54%
PBB	205,90	48,19	174,10	120,02	-59,85%
Pajak Lainnya	91,45	65,95	716,81	50,09	31,66%
Bea Masuk	10,17	5,41	10,97	7,85	-31,03%
Bea Keluar	49,46	384,63	79,55	81,29	373,14%
Total	5.058,58	3.649,90	5.205,72	4.227,29	-13,66%

Sumber : OM SPAN; KPP Lingkup Provinsi Jambi (data diolah berdasarkan cut off tanggal 15 Oktober 2021)

Pajak Dalam Negeri (PPh, PPN, PBB, Cukai, Pajak Lainnya)

Dilihat secara porsi, PPh dan PPN masih menjadi penopang utama penerimaan perpajakan. Namun sayangnya diperiode ini, terlihat capaian di kedua sektor ini mengalami penurunan dari tahun lalu. Penurunan tidak hanya terjadi di kedua sektor ini saja, melainkan hampir diseluruh jenis pajak. Satu-satunya jenis pajak yang mengalami peningkatan adalah pajak lainnya yang diakibatkan peningkatan cukup besar pada penjualan benda materai dan pendapatan bunga penagihan atas PPh dan PPN.

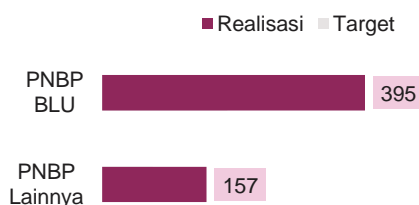
Pajak Internasional (Bea Masuk dan Bea Keluar)

Pendapatan pajak internasional juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat pada periode ini khususnya pada bea keluar. Penerimaan Bea Keluar pada di Jambi didominasi dari komoditi *Palm kernel Shell* (cangkang kelapa sawit) yang diekspor ke Jepang. Permintaan cangkang kelapa sawit beberapa tahun terakhir meningkat karena sebagai sumber energi yang terbarukan. Volume ekspor (*tonnage*) mengalami peningkatan karena siklus masa puncak panen kelapa sawit yang dimulai pada bulan November 2020 dan berakhir bulan Maret 2021. Pada kegiatan *Indepth Interview Eksportir CPO*, dan Turunannya di Jambi, khususnya cangkang kelapa sawit para eksportir menyampaikan harapan bahwa kenaikan tarif Bea keluar agar dapat dipertimbangkan karena eksportir telah melakukan kontrak dengan pembeli untuk periode 1 (satu) tahun. Trend harga jual cangkang kelapa sawit tidak mengikuti trend harga jual CPO dunia karena cangkang merupakan produk sisa.

2.1.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tabel II-3 Rekapitulasi PNBPN Triwulan III 2021 & 2020

(dalam Miliar Rupiah)



Jenis PNBPN	2021		2020		Naik/Turun
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
PNBPN BLU	188,53	395,43	240,08	424,74	-6,90%
PNBPN Lainnya	75,87	157,26	176,95	182,55	-13,85%
Total	264,40	552,69	417,04	607,28	-8,99%

Sumber : OM SPAN (data diolah berdasarkan cut off tanggal 15 Oktober 2021)

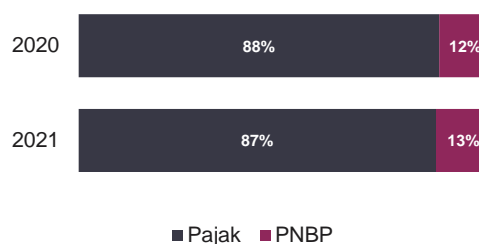
Untuk Provinsi Jambi, PNBP terdiri dari PNBP BLU dan PNBP Lainnya. PNBP BLU sudah melampaui target untuk tahun ini, namun masih lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu. Penurunan ini disebabkan penurunannya realisasi pendapatan dari BLU di Bidang Kesehatan seiring menurunnya penanganan pasien COVID di masing-masing Rumah Sakit. Sedangkan realisasi PNBP lainnya juga mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan penurunan capaian pada satker-satker dengan PNBP besar seperti Kepolisian, KSOP dan Kejaksaan.

Analisis Komposisi

Jika dilihat dari komposisinya, dari tahun lalu hampir tidak ada perubahan dari porsi pajak dan PNBP. Hal ini menunjukkan bahwa perpajakan masih menjadi andalan utama sumber penerimaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kontribusi baik BLU maupun PNBP dari pelayanan masih memiliki peran yang sangat

kecil di Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan karena dari tahun 2020 ke 2021 tidak terdapat penambahan jumlah BLU di Provinsi Jambi sehingga tidak mampu menambah pendapatan PNBP. Selain itu, dampak dari COVID-19 yang mempengaruhi pendapatan BLU khususnya di sektor Pendidikan juga membuat sektor PNBP itu tidak banyak berubah dari tahun lalu.

Grafik II-1 Perbandingan Komposisi Pajak- PNBP Tahun 2021 & 2020



Analisis Tax Ratio

Jika kita lihat pada tabel di samping, terlihat bahwa terjadi penurunan tax ratio dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena penurunan kinerja penerimaan perpajakan pada tahun 2021. Selain itu *tax ratio* yang rendah ini juga disebabkan pengaruh atau kontribusi Penerimaan Perpajakan Provinsi Jambi yang sangat kecil jika dibandingkan Penerimaan Pajak Nasional. Selain itu, laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi di tahun ini juga jauh lebih tinggi yaitu mampu tumbuh 5,39% (y-on-y) sementara penerimaan perpajakan turun 14% dari tahun lalu. Perbedaan ini semakin membuat tax ratio masih sangat jauh dari kondisi ideal yang diharapkan.

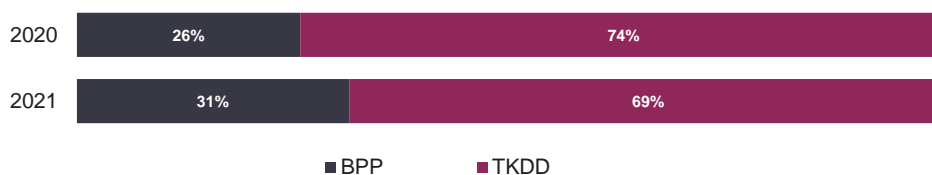
Tabel II-4 Perbandingan Tax Ratio 2021 & 2020 (dalam Miliar Rupia)

	2021	2020
Penerimaan Perpajakan	3.649,90	4.227,29
PDRB	60.685,23	51.282,01
Tax Ratio	6%	8%

2.1.2. Belanja Negara

Analisis Kontribusi dan Komposisi Belanja

Grafik II-2 Komposisi Belanja Pemerintah Pusat dan TKDD Tahun 2021 & 2020



Jika kita lihat grafik di atas terlihat bahwa terjadi perubahan yang cukup besar antara Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan TKDD. Belanja Pemerintah Pusat meningkat 5% dari tahun lalu yang sejalan dengan percepatan yang dilakukan oleh K/L dalam melakukan realisasi. Disisi lain, belanja TKDD juga mengalami perlambatan yang terlihat dari menurunnya kinerja khususnya dari penyaluran DAK Fisik yang masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena terjadinya relaksasi pada penyaluran DAK Fisik tahun 2020 sehingga membuat realisasinya sangat besar jika dibandingkan tahun ini. Selain itu, kebiasaan OPD yang mencairkan kontrak mendekati batas akhir juga mempengaruhi komposisi realisasi TKDD di tahun ini. Ditambah lagi, terdapat keterlambatan pada penyaluran DAU dan DBH untuk Pemprov Jambi yang disebabkan keterlambatan dalam mengalokasikan *earmark* DAU/DBH untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Keterlambatan tersebut mengakibatkan Pemprov Jambi tidak menerima penyaluran DAU dari bulan Maret-Juli dan tentunya berdampak juga terhadap realisasi TKDD secara total. Untuk menutupi belanja operasional karena keterlambatan tersebut, Pemprov Jambi memanfaatkan dana SILPA dari tahun lalu.

Analisis Pertumbuhan dan Kemanfaatan Belanja

2.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat secara total mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi pada seluruh jenis belanja khususnya Belanja Modal yang mengalami peningkatan paling signifikan. Peningkatan ini salah satunya disebabkan karena dorongan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan percepatan realisasi agar mampu sebagai stimulus positif yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga, terdapat beberapa kekhawatiran dari sebagian satker bahwa akan terjadi pemotongan alokasi seperti tahun lalu sehingga beberapa satker menyetujui realisasi belanja modal.

Sektor Unggulan Daerah - Konstruksi

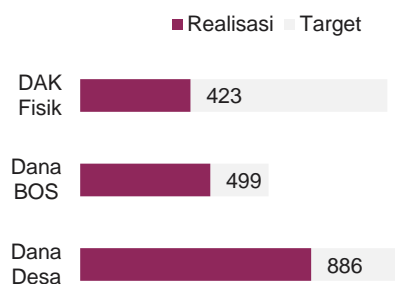
Sektor Konstruksi merupakan sektor unggulan di Provinsi Jambi. Salah satu pendorong majunya sektor ini salah satunya adalah cukup besarnya peran APBN untuk sektor ini khususnya dari Belanja Modal. Untuk Belanja Modal ini sendiri masih didominasi oleh Satuan Kerja yang berada di bawah Kementerian PUPR. Dari total realisasi Belanja Modal sebesar 1.012 Miliar, Kementerian ini menyumbang realisasi sebesar 772,34 Miliar atau 76% dari total realisasi Belanja Modal. Belanja dimaksud digunakan untuk penggantian jembatan, rehabilitasi jembatan, pelebaran jalan, revitalisasi drainase, preservasi jalan, perencanaan dan pengawasan revitalisasi jalan serta jembatan. Hingga akhir triwulan III, masih terdapat 58,40 M sisa kontrak dari belanja penambahan nilai jalan dan jembatan.

2.1.2.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Realisasi Dana Transfer ke Daerah masih di dominasi dari DAU dengan proporsi 65,67%. Hingga triwulan III ini seluruh Pemda sudah menganggarkan *earmark* DAU/DBH minimal 8% untuk penanggulangan COVID dan pemberdayaan ekonomi.

Tabel II-4 TKDD yang Dibayarkan oleh KPPN di Provinsi Jambi Triwulan III 2021 & 2020

(dalam Miliar Rupiah)



Jenis TKDD	2021		2020		Naik/Turun
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
DAK Fisik	1.178,61	423,27	1.100,86	1.042,57	-59,40%
Dana BOS	723,21	498,61	760,66	571,51	-12,76%
Dana Desa	1.222,14	885,89	1.206,72	960,48	-7,77%
Total	3.123,96	1.807,77	3.068,24	2.574,57	-29,78%

Sumber: OM SPAN (data diolah berdasarkan cut off tanggal 15 Oktober 2021)

1. DAK Fisik

Realisasi DAK Fisik masih sangat rendah hingga Triwulan III ini. Jika dibandingkan tahun lalu terjadi penurunan penyaluran sebesar 59,40%. Hanya terdapat 1 Pemda yang sudah melebihi 60% dari realisasi yaitu Pemkot Sungai Penuh. Sementara sisanya masih di bawah 60% bahkan beberapa masih di bawah 30%. Lambatnya penyerapan DAK Fisik ini sering terkendala pada proses pelelangan ataupun proses pengadaan. Dan hal ini terus berulang dari tahun ke tahun sehingga realisasi DAK Fisik selalu lambat di awal periode dan baru akan terealisasi maksimal di Triwulan IV. Permasalahan ini sudah disampaikan secara langsung kepada Gubernur Jambi pada beberapa kali kesempatan Audiensi sejak bulan Juli hingga Oktober 2021. Dari hasil pertemuan tersebut, Gubernur berjanji akan mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi kemajuan realisasi khususnya DAK Fisik dan Dana Desa di Daerah.

2. Dana BOS

Dana BOS Affirmasi dan Kinerja sudah disalurkan 100% dengan total nilai 7,4 Miliar. Sedangkan untuk BOS Reguler sudah disalurkan Tahap 1 untuk 3.527 Sekolah dengan total nilai 209,95 Miliar, Tahap 2 untuk 3.544 Sekolah dengan total nilai 281,27 Miliar sehingga total penyaluran untuk BOS Reguler sebesar 491,21 Miliar.

Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi pada tahun ini sedikit menurun baik dari sisi nominal maupun tahapan. Tahun sebelumnya di Bulan September 2020 sudah terdapat penyaluran untuk Tahap 3 BOS Reguler, sementara di tahun ini baru disalurkan pada bulan Oktober 2021 meskipun sudah diajukan pada akhir September 2021.

3. Dana Desa

Penyaluran Dana Desa mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya relaksasi yang diberikan pada tahun 2020 sehingga realisasi untuk Dana Desa mengalami peningkatan pesat khususnya untuk triwulan II dan III. Namun jika dilihat dari sisi capaian terhadap pagu sudah cukup baik diatas 70%. Realisasi *earmark* juga sudah mencapai hampir 100% dengan hanya 1 Desa yang tidak menyalurkan. Selain itu, selain 1 Desa yang belum menyalurkan BLT untuk Bulan ke-8 dan 9 seluruhnya sudah menyalurkan BLT hingga bulan ke-9. Capaian ini sangat menggembirakan karena harapan agar bantuan Pemerintah hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dapat dirasakan secara langsung sesuai dengan jadwal yang seharusnya.

2.1.3. Surplus/Defisit

Tabel II-5 Perkembangan Surplus/Defisit Provinsi Jambi 2021 & 2020

(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2021		2020		Naik/Turun
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Surplus/Defisit	-17.006,84	-11.293,88	-16.774,19	-11.085,09	1,88%

Sumber: OM SPAN (data diolah)

Selama 2 tahun terakhir, Provinsi Jambi masih mengalami defisit APBN. Bahkan di tahun ini, terjadi peningkatan defisit pada APBN. Dengan kata lain, di tahun ini membutuhkan subsidi yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Peningkatan defisit ini juga menjadi indikator APBN bahwa laju penerimaan negara yang justru turun belum mampu memenuhi laju belanja negara yang mengalami peningkatan dari tahun lalu.

2.1.4. Prognosis APBN

Dengan kondisi sampai saat ini, Pemerintah sudah sangat optimis bahwa *recovery* ekonomi sudah terjadi. Harga sawit dan batubara yang terus menguat di Pasar Internasional juga memberikan sinyal positif bahwa ekonomi akan terus bertumbuh hingga akhir tahun. Apalagi di Triwulan III ini tingkat PPKM yang terus menurun seiring dengan penurunan tingkat penularan dan pasien yang dirawat. Oleh karena itu, Pemerintah optimis bahwa realisasi pendapatan dan belanja di akhir tahun nanti akan memberikan hasil yang menggembirakan dan mampu mencapai target yang diberikan. Berikut adalah proyeksi realisasi APBN pada akhir tahun 2021:

Tabel II-6 Proyeksi APBN pada Prov. Jambi s.d. Triwulan IV Tahun 2021

(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Pagu	Rp Realisasi s.d. Tw III	% Realisasi s.d. Tw III	Rp Perkiraan s.d. Tw IV	% Perkiraan s.d. Tw IV
Pendapatan	5.329,27	4.202,59	78,86%	5.397,00	101,27%
Belanja	22.336,53	15.496,47	69,38%	21.391,94	95,77%
Surplus/Defisit	-17.006,84	-11.293,88		-16.669,57	

2.1.5. Analisis Capaian Output: Layanan Dasar Publik

Tabel II-7 Capaian Output Strategis Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Provinsi Jambi Tahun 2021

(dalam Miliar Rupiah)

Sektor	Pagu	Realisasi	% Rp	Rata-rata % Output	Rata-Rata GAP
Kesehatan	9,77	5,30	47,27%	51,82%	4,56%
Pendidikan	199,87	81,77	41,76%	47,37%	5,62%
Infrastruktur	460,05	249,13	56,99%	63,73%	6,74%
Total	669,68	336,19	50,37%	56,11%	5,73%

Sumber: OM SPAN (data diolah)

Jika dilihat pada tabel diatas, terlihat secara umum bahwa capaian output baik untuk sektor Kesehatan, Pendidikan maupun Infrastruktur masih cukup rendah. Target capaian output ini sedikit dibawah realisasi untuk belanja pemerintah pusat yang sudah mencapai 64,08%. Jika kita lihat pada tabel diatas, terlihat sektor pendidikan dan infrastruktur masih memiliki GAP diatas 5%. Rendahnya capaian output di kedua sektor ini disebabkan masih banyak kegiatan yang masih dalam proses sehingga cukup sulit untuk menghitung progress pelaksanaan apalagi beberapa

output bukan merupakan kegiatan yang dikontrakkan ataupun memiliki standar capaian yang jelas. Selain itu, terdapat pula kendala di internal satker dalam melakukan perhitungan capaian output sehingga seringkali capaian output yang ada disistem tidak mempresentasikan realita yang ada di lapangan. Untuk detail capaian per sektor dapat dilihat pada lampiran kajian ini.

2.2. Pelaksanaan APBD

Tabel II-8 Pagu dan Realisasi APBD s.d. Triwulan III TA 2021 & 2020

(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2021			2020			% Growth
	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	
PENDAPATAN	17.905,21	11.162,13	62%	18.226,51	12.134,62	67%	-8%
1. Pendapatan Asli Daerah	2.910,07	2.010,35	69%	2.595,27	1.767,77	68%	14%
Pajak Daerah	1.823,96	1.433,95	79%	1.613,25	1.166,13	72%	23%
Retribusi Daerah	140,92	70,29	50%	97,77	59,36	61%	18%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	126,00	121,26	96%	120,69	121,97	101%	-1%
Lain-lain PAD yang Sah	819,19	384,85	47%	763,56	420,30	55%	-8%
2. Pendapatan Transfer	14.534,59	9.043,57	62%	15.175,32	10.351,82	68%	-13%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	13.823,98	8.660,40	63%	14.458,11	9.853,94	68%	-12%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	710,61	383,16	54%	717,21	497,88	69%	-23%
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	460,55	108,21	23%	455,93	15,04	3%	620%
Hibah	72,60	44,71	62%	422,29	11,67	3%	283%
Lain-lain Pendapatan yang Sesuai Dengan UU	387,96	63,50	16%	33,64	3,36	10%	1.788%
BELANJA DAERAH	19.069,40	9.495,92	50%	19.522,22	9.799,79	50%	-3%
1. Belanja Operasi	12.652,25	6.812,71	54%	12.265,85	7.089,11	58%	-4%
Belanja Pegawai	7.314,66	4.644,39	63%	7.618,22	4.613,53	61%	1%
Belanja Barang dan Jasa	4.061,78	1.972,34	49%	3.524,81	1.978,99	56%	0%
Belanja Bunga	21,91	5,40	25%	1,00	0,00	0%	0%
Belanja Subsidi	13,61	13,43	99%	19,13	18,03	94%	-26%
Belanja Hibah	1.184,83	143,69	12%	1.028,78	422,58	41%	-66%
Belanja Bantuan Sosial	55,46	33,45	60%	73,92	55,99	76%	-40%
2. Belanja Modal	3.077,80	1.332,57	43%	3.526,65	1.362,16	39%	-2%
3. Belanja Tak Terduga	573,38	74,34	13%	971,55	230,06	24%	-68%
4. Belanja Transfer	2.765,98	1.276,30	46%	2.758,17	1.118,45	41%	14%
Belanja Bagi Hasil	649,25	404,72	62%	15,97	420,76	2634%	-4%
Belanja Bantuan Keuangan	2.116,73	871,58	41%	2.742,19	697,69	25%	25%
SURPLUS / DEFISIT	-1.164,19	1.666,20	-143%	-1.295,71	2.334,84	-180%	-29%
PEMBIAYAAN DAERAH	1.164,19	691,65	59%	1.314,76	1.217,44	93%	-43%
1. Penerimaan Pembiayaan	1.256,46	708,31	56%	1.349,52	1.241,00	92%	-43%
SiLPA	749,64	559,83	75%	1.199,52	1.241,00	103%	-55%
Penerimaan Pinjaman Daerah	506,82	148,48	29%	150,00	0,00	0%	0%

2. Pengeluaran Pembiayaan	92,27	16,66	18%	34,77	23,56	68%	-29%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo	35,78	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
Penyertaan Modal Daerah	56,49	16,66	29%	34,77	23,56	68%	-29%
SILPA	0,00	2.357,86		19,05	3.552,28		-34%

Sumber: SIKD; GFS (data diolah)

2.2.1. Pendapatan Daerah

Jika kita melihat pada tabel diatas, terjadi penurunan pagu pendapatan untuk tahun 2021. Namun penurunan pagu tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pada realisasi malah turun dari tahun sebelumnya. Penurunan terjadi karena kebiasaan Pemda yang mengajukan syarat penyaluran seperti DAK Fisik di batas akhir pengajuan. Penyebab lainnya adalah Pemprov Jambi belum mengalokasikan DAU/DBH sehingga DAU tidak disalurkan.

Jika kita lihat kolom pertumbuhannya, terlihat bahwa terdapat pertumbuhan yang sangat besar pada Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lain-lain. Pertumbuhan tersebut sebagian besar berasal dari Hibah dari dana BOS dan Pengembalian Hibah pada Badan Hukum. Pendapatan ini tidak dianggarkan pada tahun sebelumnya sehingga terlihat memiliki pertumbuhan yang sangat besar padahal hanya memiliki porsi 3% dari Pendapatan Daerah.

Analisis Komposisi

Grafik II-3 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2021 & 2020



Secara umum dapat kita lihat terjadi peningkatan PAD dari tahun lalu. Jika kita melihat sekilas, seolah-olah terdapat peningkatan tingkat kemandirian daerah dari tahun lalu. Namun jika kita teliti lebih lanjut, penurunan transfer tersebut terjadi karena keterlambatan penyaluran DAU pada Pemprov Jambi. Hal tersebut disebabkan karena Pemprov Jambi belum melakukan alokasi untuk *earmark* DAU/DBH sehingga DAU tidak disalurkan sejak bulan Maret-Juli. Selain itu, keterlambatan ini juga terjadi untuk penyaluran DAK Fisik yang baru mulai disalurkan pada bulan Juli sehingga membuat realisasi pendapatan transfer lebih rendah dari tahun lalu.

Untuk PAD sendiri pada tahun ini memang meningkat dari tahun lalu. Jika kita lihat perbandingan komponen PAD antara tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Grafik II-4 Komposisi PAD Tahun 2021 & 2020



Jika dilihat dari komposisinya, terjadi peningkatan yang cukup besar dari Pajak Daerah. Peningkatan pajak daerah berasal dari peningkatan yang sangat besar pada Pajak Rokok, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

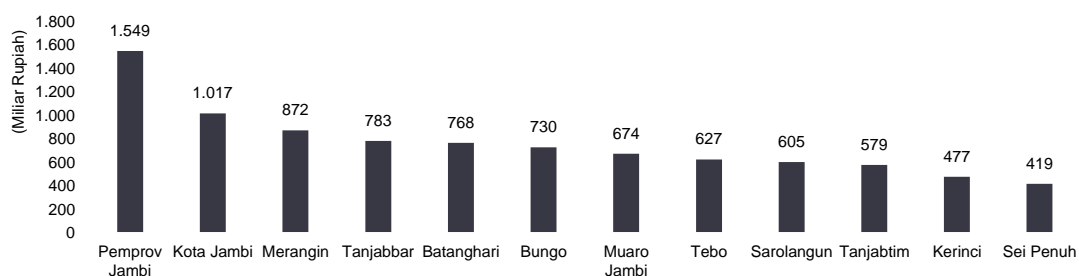
Pertumbuhan PAD dipengaruhi pula oleh fenomena penurunan level PPKM diberbagai Kota dan Kabupaten di Provinsi Jambi. Penurunan level PPKM itu memicu peningkatan aktifitas baik pada tempat hiburan, rekreasi, olahraga termasuk peningkatan pula pada sektor kuliner, perhotelan dan aktifitas pendidikan yang mulai berangsur normal.

2.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah secara umum hampir sama dengan tahun lalu dengan penurunan hanya 2% dari tahun lalu. Belanja pegawai, barang dan bunga hampir tidak mengalami perubahan dari tahun lalu. Penurunan yang cukup besar terjadi pada belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial. Untuk belanja non operasional seperti belanja modal juga hampir sama dengan tahun lalu. Sementara untuk belanja tak terduga turun 68% dari tahun lalu. Hal ini disebabkan penanganan COVID-19 yang pada tahun lalu masih ditutupi dari belanja tak terduga kini sudah dialokasikan dengan lebih rapi melalui *earmark* maupun dari dana penanganan COVID yang secara khusus dialokasikan di dinas atau instansi terkait. Untuk belanja transfer mengalami peningkatan sebesar 44% yang disebabkan peningkatan signifikan dari belanja bantuan keuangan. Belanja ini berasal dari bantuan pemerintah Kabupaten kepada Desa yang direalisasikan lebih besar dari tahun lalu.

Analisis Komposisi Spasial

Grafik II-5 Komposisi Belanja Per Kabupaten



Jika dilihat sebaran realisasinya, komposisi belanja daerah masih tersentralisasi di Pemerintah Provinsi Jambi dan Kota Jambi dengan porsi 28% dari total belanja daerah. Sedangkan untuk Kabupaten lainnya cenderung memiliki jumlah realisasi yang sama kecuali untuk Tanjab Timur, Kerinci dan Sungai Penuh yang memiliki realisasi paling rendah.

Analisis Pertumbuhan

Jika kita lihat kembali Tabel II-8 diatas, dapat dilihat bahwa hanya terjadi pertumbuhan pada belanja transfer. Sementara untuk belanja operasional maupun belanja modal terjadi penurunan. Rendahnya realisasi khususnya untuk belanja modal ini disebabkan karena masih banyak pekerjaan yang sedang dalam proses sehingga belum dapat direalisasikan. Sedangkan untuk belanja rutin cenderung sama dengan tahun lalu.

2.2.3. Surplus/Defisit

Pada tahun 2021, nilai surplus anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun penurunan surplus ini bukan disebabkan karena terjadi pertumbuhan pendapatan, tapi lebih disebabkan karena melambatnya belanja daerah. Jika diperhatikan lebih lanjut, konsep anggaran

yang digunakan adalah anggaran defisit sehingga seharusnya belanja lebih banyak dari pendapatan yang dikumpulkan dengan harapan belanja daerah mampu menjadi penggerak perekonomian daerah. Sayangnya capaian belanja daerah sampai periode ini secara total bahkan belum menyentuh 50% sementara capaian pendapatan sudah mencapai 60%. Akibatnya tujuan percepatan belanja daerah belum dapat tercapai dengan maksimal.

2.2.4. Pembiayaan Daerah

Jika diperhatikan SILPA pada tahun 2020 yang cukup besar, seharusnya Pemerintah Daerah lebih bisa memanfaatkan kelebihan dana tersebut untuk penyertaan modal atau bahkan memberikan pinjaman kepada daerah lain. Namun yang terjadi adalah dana SILPA lebih banyak digunakan sebagai dana operasional di awal tahun menjelang diberikannya Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Kabar baiknya di tahun ini pola penggunaan SILPA tersebut mengalami penurunan dari tahun lalu. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan pola penggunaan anggaran pada Pemerintah Daerah yang lebih mempercepat proses pencairan Dana Perimbangan sehingga mampu mendanai belanja-belanja operasional.

2.2.5. Prognosis APBD

Tabel II-9 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi s.d. Triwulan III Tahun 2021)

(dalam Miliar Rupiah)

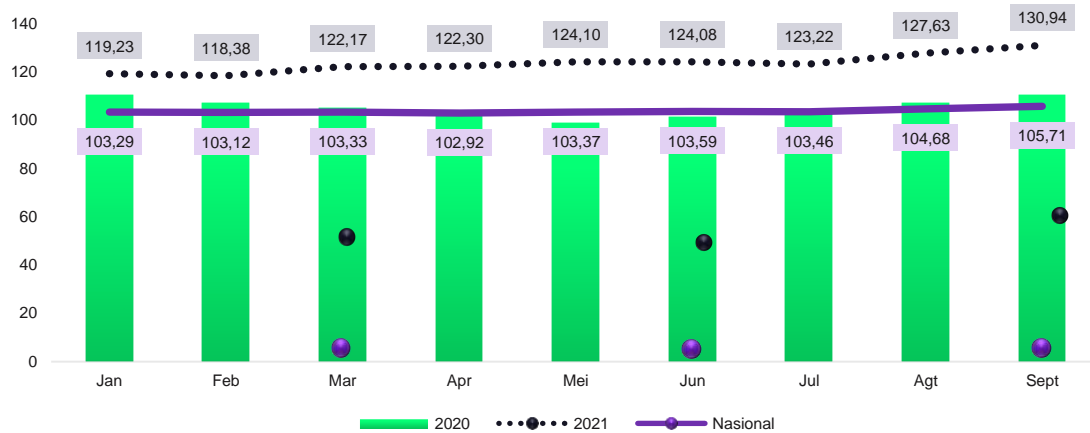
Uraian	Pagu	Rp Realisasi s.d. Tw III	% Realisasi s.d. Tw III	Rp Perkiraan Realisasi s.d. Tw IV	% Perkiraan Realisasi s.d. Tw IV
Pendapatan	17.905,21	10.764,35	60,12%	17.189,13	96,00%
Belanja	19.069,40	9.098,20	47,71%	16.505,59	86,56%
Surplus/Defisit	-1.164,19	1.666,15	-143,12%	683,53	

Melihat tren 3 tahun terakhir, serta dengan mempertimbangkan progress pemulihan ekonomi yang berjalan cukup baik diproyeksikan bahwa pada akhir tahun nanti realisasi Pendapatan APBD mampu mencapai 96% dari target. Meskipun begitu, terdapat beberapa hal yang tetap menjadi perhatian. Antara lain penerapan PPKM yang mulai diberlakukan pada Triwulan III dan beberapa kali sudah diperpanjang mengikuti kondisi di masing-masing daerah. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi capaian diatas karena secara langsung akan mempengaruhi jam kerja dan pergerakan manusia secara besar.

BAB III. ANALISIS TEMATIK

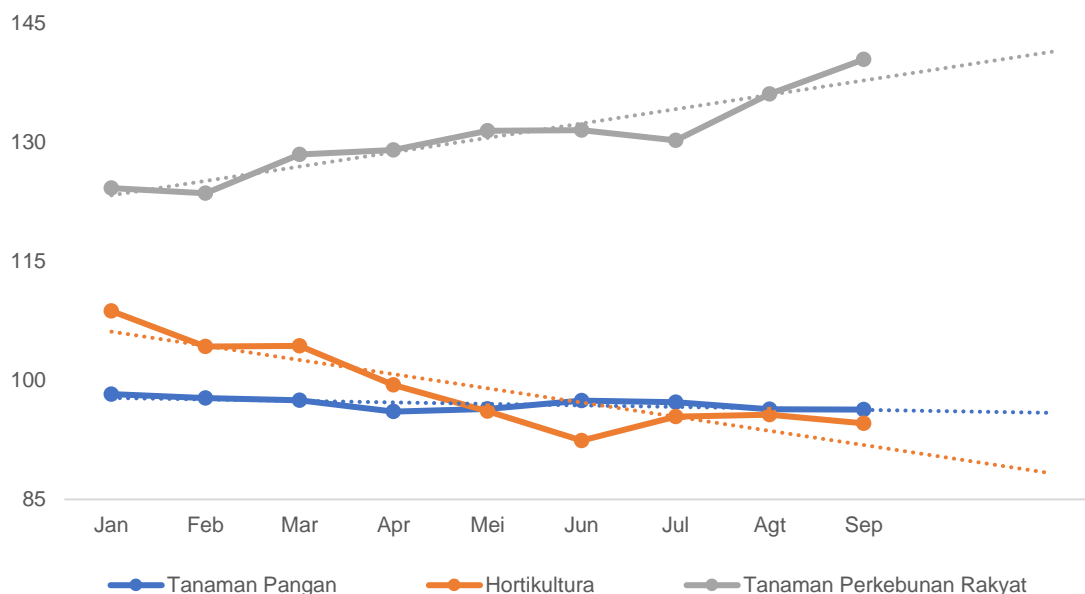
3.1. Peran Fiskal Untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan: Analisis NTP dan NTN

Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan Indikator Proxi Kesejahteraan Petani dan Nelayan. Jika NTP atau NTN lebih dari 100, artinya petani atau nelayan mengalami surplus. Dengan kata lain, pendapatan yang diterima lebih besar daripada pengeluaran sehingga hasil dari pertanian atau perikanan tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.



Jika kita lihat perkembangan NTP dan NTN di Provinsi Jambi dari tahun lalu, NTP menunjukkan pertumbuhan yang positif. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk tahun 2021 ini memiliki capaian yang sangat menggembirakan mampu melebihi tingkat NTP Nasional. Namun sayangnya jika lihat NTP ini per subsektor masih banyak yang harus menjadi perhatian. Berikut adalah grafik tren nilai tukar per subsektor sepanjang tahun 2021:

Grafik III-1 Perkembangan NTP per Subsektor dan Analisis Tren hingga Akhir Tahun 2021



Sampai dengan bulan September 2021, hanya subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat dan Perikanan yang secara konsisten memiliki nilai tukar diatas 100. Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai komoditas unggulan perkebunan yakni kelapa sawit, karet, kelapa dalam, pinang, kopi dan kayu manis. Data Kementan tahun 2020 menyebutkan bahwa jumlah petani perkebunan rakyat kelapa sawit mencapai 285.297 KK dengan jumlah produksi sebesar 1.469.619 ton dan luas area ketiga terbesar di wilayah Sumatera yaitu sebesar 651.712 Ha. Harga komoditi sawit yang sempat anjlok di periode Juli 2021 membuat NTP sempat turun dibawah tren pada bulan Juli 2021. Namun, harga yang kembali merangkak naik di bulan September 2021 kembali membuat NTP tumbuh diatas tren dimana kondisi harga CPO mencapai 12.000 per kilogram dan harga TBS 2.604,43 per kilogram (InfoSAWIT), mendorong kenaikan indeks petani di subsektor tanaman perkebunan rakyat ini.

Sementara untuk sektor tanaman pangan hingga triwulan III ini masih menunjukkan nilai tukar yang defisit atau dibawah 100 dengan tren yang cenderung menurun dari bulan ke bulan. Meskipun tren penurunan ini tidak terlalu tajam, namun sektor tanaman pangan ini menjadi perhatian khusus Pemerintah karena berdampak langsung terhadap ketahanan pangan. Tren yang terus menurun ini juga menunjukkan bahwa kesejahteraan petani terus menurun sementara biaya produksi dan biaya hidup cenderung terus meningkat.

Tidak hanya tanaman pangan, Hortikultura juga mulai terancam untuk kembali mengalami penurunan nilai tukar setelah sebelumnya mengalami perbaikan di awal tahun. Tren penurunan nilai tukar untuk tanaman pangan dan Hortikultura ini salah satunya dipengaruhi oleh menumpuknya hasil panen yang tidak terserap oleh pasar. Berdasarkan hasil penelusuran oleh Dinas terkait pemicunya adalah adanya bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah atau Lembaga Sosial. Bantuan sosial terutama dari Program PEN yang diberikan oleh Pemerintah memang membantu masyarakat untuk bertahan di masa pandemi. Namun disisi lain mengakibatkan para petani tidak memiliki pasar yang cukup untuk menjual hasil panennya karena masyarakat sudah memiliki beras yang berasal dari bantuan pemerintah. Akibatnya padi yang sudah dipanen menumpuk digudang dan tidak mampu dijual. Kalaupun ada yang terjual sudah dalam kondisi yang kurang baik atau dengan harga yang jauh dari harga yang diharapkan.

3.1.1. Reviu Program Pemerintah untuk Petani dan Nelayan

Provinsi Jambi yang memiliki keragaman geografis yang tinggi memiliki berbagai macam potensial disektor pertanian, perkebunan hingga perikanan. Jika kita melihat data PDRB selama beberapa 5 tahun terakhir, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selalu menjadi penopang dari sisi produksi dengan rata-rata kontribusi sebesar 29,34% dari PDRB. Melihat peran yang sangat penting tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi selalu berupaya membuat berbagai program agar sektor ini terus maju dan berkembang sehingga mampu memajukan perekonomian Provinsi Jambi secara umum.

Salah satu Proyek Nasional untuk sektor pangan adalah Jaminan Usaha serta Korporasi Petani, dan untuk bidang ketahanan pangan salah satunya yaitu kegiatan Pertanian Keluarga (*Family Farming*). Pertanian keluarga atau *family farming* (FAO,2014) merupakan cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga.

Kegiatan lain yang juga merupakan salah satu upaya pemantapan ketahanan pangan keluarga yaitu kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dengan menjadikan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Pada tahun 2021 ini, melalui dana Dekonsentrasi, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah dialokasikan Banper untuk 97 kelompok penerima manfaat di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Kegiatan ini sangat strategis apalagi dalam masa Pandemi COVID-19, yang mampu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Di tahun 2021 ini, terdapat tiga strategi Pemerintah Daerah untuk memajukan sektor pertanian. Tiga strategi tersebut yaitu:

- (1) Peningkatan produktivitas komoditas unggulan;
- (2) Pemantapan dan Pengembangan Jalan ke Kawasan dan Jalan Produksi;
- (3) Pemantapan Irigasi dan JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani).

Ketiga strategi tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan baik yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi, APBN, serta DAK Fisik.

Belanja Dekonsentrasi Sektor Pertanian

Tabel III-1 Pagu dan Realisasi Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian di Provinsi Jambi Tahun 2021
(dalam Miliar Rupiah)

Output	Pagu	Real	%	Porsi
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7,35	6,83	93%	28%
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	6,77	5,21	77%	26%
Sarana Pengembangan Kawasan	3,44	2,87	83%	13%
Sertifikasi Produk	1,18	0,96	81%	5%
Pemantauan produk	0,94	0,77	82%	4%
Output lainnya	6,12	4,18	68%	24%
Total	25,79	20,82	81%	

Sumber: MEBE (data diolah)

Terlihat bahwa perhatian pemerintah sangat besar pada pembinaan kelompok masyarakat serta sarana pengembangan kawasan dengan porsi lebih dari 25% dari total Pagu. Pembinaan pada kelompok masyarakat ini sangat diperlukan agar para petani semakin mendapatkan informasi terkini agar hasil pertanian dapat lebih maksimal baik dari sisi produksi maupun distribusi hasil penjualan. Dan pengembangan kawasan tentu memegang peranan yang sangat penting untuk menjaga agar lahan yang dapat dijadikan area produksi sektor pertanian dapat terjaga bahkan jika perlu terus meningkat. Detil output tersebut dapat dilihat pada Lampiran I KFR ini.

Salah satu bentuk pembinaan yang sering dilakukan adalah dengan pembinaan terpadu yang dilaksanakan bersama Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) di masing-masing Kabupaten. P4S didirikan dengan harapan petani tidak hanya menghasilkan produksi, namun bisa juga membangun jejaring kerjasama dengan para stakeholder dalam hal wirausaha pertanian yang mampu meningkatkan taraf hidup petani.

Belanja K/L sektor Pertanian dan Perikanan

Jika kita lihat dari sudut yang lebih luas lagi, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan sektor pertanian dan juga perikanan ini tidak hanya terbatas pada alokasi Dana Dekonsentrasi saja. Berikut adalah beberapa alokasi yang telah disediakan serta target output yang mendukung perkembangan sektor pertanian di Provinsi Jambi tahun 2021:

Tabel III-2 Output Strategis Sektor Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2021

KRO	RO	Uraian RO	Satuan	Target	Capaian	% Output	Pagu (Miliar)	Real (Miliar)	% Rp
CAI	611	Kawasan Kedelai	Unit	3.200	7	82	5,35	4,35	81
RAI	001	Area penyaluran benih padi	Unit	20.580	32.160	100	2,88	2,88	100
RAI	002	Area penyaluran benih jagung	Unit	6.236	11.236	100	3,93	3,93	100
RAI	010	Kawasan Bawang Merah	Ha	30	29	99	0,21	0,21	99
RAI	011	Kawasan Aneka Cabai	Ha	100	88	89	1,18	1,04	89
RAI	621	Kawasan Padi	Unit	418	422	100	0,57	0,57	100
Output lainnya							32,88	26,45	80
							47,00	39,43	84

Sumber: OM SPAN (data diolah)

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 47 Miliar untuk kegiatan dan program pengembangan sektor pertanian dengan total realisasi sudah mencapai 39,43 Miliar (84%). Dengan dana yang sudah dibelanjakan tersebut, capaian output yang sudah dihasilkan sudah sangat banyak sekali dengan capaian diatas 70% bahkan beberapa sudah mencapai 100%. Optimalnya pelaksanaan belanja di Kementerian Pertanian ini tentunya akan sangat mengurangi beban para petani baik beban dari sisi produksi maupun beban dalam distribusi.

Beberapa capaian yang perlu menjadi sorotan dan perhatian adalah tingginya capaian untuk area penyaluran benih padi, benih jagung serta kawasan padi yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Jambi. Pengembangan Kawasan Kedelai berupa bantuan benih dan pupuk kepada kelompok-kelompok tani di Kab.Merangin, Sarolangun, Batanghari, Tanjabtim, Tebo, Bungo dan Muaro Jambi. Luasnya area penyaluran benih padi yang mencapai 84,77ribu hektar akan meningkatkan kapasitas produksi sehingga untuk jangka panjangnya akan sangat mempengaruhi kontribusi sektor ini terhadap perekonomian. Tidak hanya itu, tingginya capaian khususnya untuk kawasan bawang merah dan kawasan aneka cabai juga memberikan angin segar terhadap hasil cabai dan bawang dimana untuk Provinsi Jambi kedua komoditas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap inflasi. Dengan lahan produksi yang meningkat serta pengelolaan yang baik tentunya akan menjaga ketersediaan pasokan cabai dan bawang ke depan sehingga tingkat inflasi kedua komoditas tersebut dapat lebih dikendalikan.

Output lainnya adalah output-output yang sifatnya penunjang fisik juga telah dialokasikan secara khusus oleh Pemerintah sebagai bagian dari Program PEN untuk mendorong sektor pertanian. Contohnya adalah pembangunan Irigasi, embung serta perpompaan besar yang sangat bermanfaat untuk menjaga pengairan lahan khususnya pada musim kemarau akan sangat membantu petani untuk menjaga hasil produksinya. Program-program tersebut juga telah terealisasi dengan baik dengan rata-rata capaian sudah melebihi 90% kecuali untuk optimalisasi lahan yang masih dalam pengerjaan.

Tabel III-3 Output Strategis Sektor Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

KRO	RO	Uraian RO	Satuan	Target	Capaian	% Output	Pagu (Miliar)	Real (Miliar)	% Rp
QEG	001	Sarana produksi usaha perikanan budidaya yang didistribusikan ke masyarakat (PEN)	Unit	50	0	54	6,02	3,16	52,42
	002	Pakan Ikan yang disalurkan ke masyarakat (PEN)	kg	117.096	137.070	95	1,45	1,44	99,56
	002	Sarana budidaya sistem minapadi yang didistribusikan ke masyarakat (PEN)	Unit	40	40	100	1,51	1,50	99,33
QEL	001	Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat (PEN)	ekor	9.281.611	8.949.400	89	2,63	2,44	92,65
	051	Calon Induk Unggul yg disalurkan ke masyarakat (PEN)	ekor	52.413	35.949	65	1,45	1,39	95,67
							13,06	9,92	76%

Sumber: OM SPAN (data diolah)

Tidak hanya di Kementerian Pertanian, untuk mendorong sektor Perikanan dan Kelautan Pemerintah juga telah mengalokasikan dana sebesar 13,06 Miliar yang telah terealisasi sebesar 9,92 Miliar (76%). Program Pemerintah di sektor perikanan ini lebih banyak difokuskan dalam bentuk bantuan benih dan pakan karena sektor perikanan ini khususnya ikan budidaya memiliki indeks nilai tukar yang masih rendah. Dengan adanya bantuan pakan dan benih ini diharapkan dapat meringankan biaya produksi para pembudidaya ikan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan pembudidaya.

Tabel III-4 Output Strategis Sektor Pertanian pada Kementerian PUPR Tahun 2021

KRO	RO	Uraian RO	Satuan	Target	Capaian	% Output	Pagu (Miliar)	Real (Miliar)	% Rp
RBS	086	Daerah irigasi Batang Asai yang dibangun (PEN)	Km	2	1	62	239,71	149,42	62,33

Sumber: OM SPAN (data diolah)

Sebagai bentuk dukungan terhadap infrastruktur pertanian, Pemerintah juga telah menyiapkan dana sebesar 239,71 Miliar yang digunakan untuk pembangunan irigasi Batang Asai. Pembangunan dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun yang sudah berjalan sejak tahun 2017 yang lalu dan ditargetkan selesai pada tahun 2022 mendatang. Pembangunan irigasi batang asai ini dilakukan dengan harapan agar Kabupaten Sarolangun dapat menjadi salah satu lumbung padi bagi Provinsi Jambi. Daerah Irigasi Batang Asai sendiri merupakan salah satu daerah irigasi yang masuk dalam program pengembangan yang dilakukan Ditjen SDA melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI. Daerah irigasi ini untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui pembangunan jaringan irigasi sawah.

Pembangunan irigasi ini juga nantinya diharapkan mampu mendorong produksi padi di Kabupaten Sarolangun yang pada saat ini memiliki tingkat produksi per hektar paling rendah di Provinsi Jambi dengan kapasitas hanya 33 ton/ha.

Pembiayaan KUR Sektor Pertanian dan Perikanan

Tabel III-5 Penyaluran KUR Sektor

Sektor	Debitur	Penyaluran
Industri Pengolahan	1.954	101,11
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	3.512	157,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	162	10,46
Jasa Pendidikan	20	1,59
Konstruksi	6	0,67
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.253	85,14
Perdagangan Besar dan Eceran	27.794	1.150,74
Perikanan	709	37,71
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	43.098	2.650,42
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	152	15,34
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	315	21,81
Jumlah Sektor Pertanian dan Perikanan	43.807	2.688,14
Jumlah Total Penyaluran KUR	78.975	4.232,37
% Sektor Pertanian	55%	63%
% Sektor Perikanan	1%	1%
% Sektor Pertanian dan Perikanan	56%	64%

Sumber: SIKP (data diolah)

Selain dana yang dialokasikan pada APBN, Pemerintah juga mendorong sektor pertanian dan perikanan melalui bantuan permodalan dalam bentuk subsidi bunga pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jika melihat tabel diatas, sangat jelas sekali bahwa kedua sektor ini merupakan sektor yang paling merasakan manfaat dari KUR itu sendiri dengan porsi lebih dari 50% baik dari jumlah debitur maupun jumlah penyaluran.

Jika dilihat dari sisi debiturnya, pemanfaatan KUR baik di sektor pertanian maupun sektor perikanan masih dominan dimanfaatkan oleh Perorangan. Untuk sektor pertanian misalnya, 77% berasal dari perorangan. Sedangkan untuk sektor perikanan sebesar 89%. Namun yang cukup menarik adalah, di sektor pertanian KUR ini juga cukup banyak dimanfaatkan oleh Badan Usaha baik itu dalam bentuk Koperasi maupun Kelompok Tani ataupun Gapoktan di Kab.Tebo, Kab.Merangin, Kab. Tanjabar dengan penyaluran lebih dari 6.000 debitur per kabupaten. Sedangkan di sektor perikanan antara lain disalurkan kepada 250 debitur di Kab. Muaro Jambi, 112 debitur di Kab. Kerinci dan 148 debitur di Kota Jambi.

Dibandingkan tahun 2020, penyaluran KUR baik sektor pertanian maupun perikanan mengalami peningkatan cukup besar. Disektor perikanan, jumlah penyaluran di tahun 2021 tumbuh sebesar 82% sedangkan disektor pertanian sebesar 110%. Tingginya pertumbuhan penyaluran ini dipicu oleh besarnya subsidi yang diberikan Pemerintah sehingga sangat meringankan bagi para debitur untuk mengembangkan usaha.

Tabel III-6 Perbandingan Penyaluran KUR per Sektor Tahun 2020 – 2021

(dalam Miliar Rupiah)

Sektor	Skema	Tahun		Growth
		2020	2021	
Perikanan	Kecil	12,27	20,76	69%
	Mikro	8,25	16,34	98%
	Supermi	0,16	0,61	294%
Total Perikanan		20,68	37,71	82%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	Kecil	665,19	1.484,84	123%
	Mikro	584,63	1.136,81	94%
	Supermi	9,77	28,77	195%
Total Pertanian		1.259,59	2.650,42	195%
Grand Total		1.280,26	2.688,14	110%

Sumber: SIKP (data diolah)

Dari skema yang digunakan, terlihat bahwa peminat untuk KUR dengan skema Supermi mengalami lonjakan yang luar biasa baik di sektor pertanian maupun perikanan. Tingginya minat pengguna kredit Supermi ini salah satunya karena limit pinjaman yang kompetitif serta syarat yang mudah sehingga ramai pengguna perorangan yang kemudian memanfaatkan fasilitas tersebut. Apalagi skema Supermi ini memang ditujukan bagi pengusaha perorangan yang tidak memiliki agunan untuk mengajukan kredit, tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi debitur.

DAK Fisik di Bidang Pertanian dan Perikanan

Disamping belanja K/L, Pemerintah juga telah menyediakan Dana Alokasi Khusus Fisik yang ditujukan untuk mendukung perkembangan sektor Pertanian dan Perikanan. Berikut adalah alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian dan Perikanan di Provinsi Jambi untuk tahun 2021:

Tabel III-7 DAK Fisik Bidang Pertanian dan Perikanan

Bidang	Pagu	Realisasi	%
Kelautan dan Perikanan	18,57	10,10	54%
Pertanian	38,34	14,99	39%
Grand Total	56,91	25,08	44%

Alokasi pada Bidang Kelautan dan Perikanan lebih difokuskan pada pembangunan Sarpras yang dapat mendukung kegiatan pembenihan dan untuk alat penangkapan ikan baik dari

kapalnya hingga alat penangkapannya. Pembangunan sarana dan prasarana ini menjadi prioritas dari Dinas Kelautan dan Perikanan karena pada saat ini di Provinsi Jambi masih sangat kekurangan alat penangkapan bagi para nelayan tangkap dan juga fasilitas pendukung untuk pembibitan untuk ikan-ikan budidaya. Hasil diskusi dengan dinas terkait, kebutuhan akan es balok untuk nelayan dan pembangunan parik es sangat diperlukan namun karena keterbatasan biaya, pembangunan *ice cold storage* tersebut akan dialokasikan di tahun 2022. Untuk ikan budidaya sendiri yang masih memiliki nilai tukar cukup rendah disebabkan karena masih tingginya biaya produksi terutama dari pengadaan bibit ikan unggulan. Maka dari itu fokus DAK Fisik pada Bidang Kelautan dan Perikanan diarahkan pada pembangunan kolam pembibitan, rehabilitasi kolam indukan serta pengadaan pakan serta bibit unggulan khususnya untuk ikan air tawar.

Beberapa gambaran pemanfaatan DAK Fisik dalam Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Untuk membantu kapasitas produksi misalnya terdapat Bantuan Paket Budidaya Ikan Patin dengan total nilai 546 Juta di 5 Kabupaten yaitu Kab. Batanghari, Sarolangun, Tanjab Barat, Bungo dan Muaro Jambi. Selain itu juga terdapat bantuan Paket Budidaya Ikan Nila dengan total nilai 1,43 Miliar di 5 Kabupaten yaitu Kab. Sarolangun, Kerinci, Bungo, Tanjab Barat dan Muaro Jambi. Serta terdapat pula bantuan pake Budidaya Ikan Lele dengan total nilai 661 Juta di 6 Kabupaten yaitu Kab. Sarolangun, Kerinci, Batanghari, Bungo, Tanjab Barat dan Muaro Jambi;
2. Selain bantuan paket budidaya, terdapat pula pemanfaatan DAK Fisik untuk bantuan pakan ikan. Bantuan tersebut telah dialokasikan sebesar 4,71 Miliar termasuk untuk bantuan pakan yang juga digabung bersama calon induk unggulan. Bantuan ini diberikan untuk 5 Kabupaten yaitu Kab. Batanghari, Tebo, Sungai Penuh, Muaro Jambi dan Kota Jambi;
3. Selain itu terdapat pula bantuan berupa perahu nelayan senilai 2,09 Miliar yang diberikan kepada para Nelayan di 3 Kabupaten yaitu Merangin, Bungo dan Muaro Jambi;

Sementara untuk Bidang Pertanian sendiri juga diarahkan untuk pembangunan sarpras pendukung yang mampu memperlancar proses baik dari produksi hingga distribusi hasil pertanian. Kegiatan-kegiatan yang didanai dari DAK Fisik ini diarahkan untuk pembangunan irigasi, perbaikan jalan yang digunakan untuk bertani serta mendistribusikan hasil pertanian, pembuatan pintu-pintu air, serta pengadaan alat-alat pendukung produksi seperti traktor dan transplanter bibit.

Beberapa gambaran pemanfaatan DAK Fisik dalam Bidang Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Irigasi dengan total nilai 8,19 Miliar yang dibangun di 7 Kabupaten yaitu Kab. Kerinci, Merangin, Batanghari, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Pembangunan irigasi ini dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Tani di Daerah yang menjadi penerima bantuan tersebut;
2. Pembangunan DAM Parit dengan total nilai 2,60 Miliar yang dibangun di 5 Kabupaten yaitu Kab. Sarolangun, Tanjab Timur, Kerinci, Muaro Jambi dan Merangin. Pembangunan DAM ini juga dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Tani yang menjadi penerima;
3. Selain pembangunan secara fisik, pada tahun ini terdapat pula perhatian khusus dari Pemerintah untuk integrasi dan pengumpulan data serta informasi pertanian. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan balai penyuluh pertanian, pembangunan ruang data dan informasi berikut sarpras yang dibutuhkan seperti komputer dan jaringan internet. Total alokasi untuk kegiatan ini adalah 9,90 Miliar yang tersebar di seluruh Kabupaten;
4. Untuk mendukung kemudahan akses, DAK Fisik ini juga dimanfaatkan untuk membangun jalan produksi dan jalan usaha tani. Untuk pembangunan jalan ini, telah dialokasikan sebesar 4,91 Miliar dan dilaksanakan di 6 Kabupaten yaitu Kab. Sarolangun, Kerinci, Tebo, Merangin, Batanghari dan Tanjab Barat.

Secara umum dari sisi perencanaan arah dan penggunaan DAK Fisik sudah sesuai dengan ketentuan serta juknis dari K/L terkait. Dari sisi kemanfaatannya sendiripun seharusnya sudah cukup optimal dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat untuk membantu kelancaran

proses produksi mereka baik di bidang perikanan maupun pertanian. Namun yang disayangkan dari DAK Fisik ini adalah tingkat penyerapannya yang masih cukup rendah di Daerah.

Perkembangan Sektor Pertanian dan Perikanan ke Depan

Untuk tahun 2021, Pemerintah Daerah lebih memfokuskan sektor pertanian ini untuk menjaga ketahanan pangan yaitu dari ketersediaan beras, jagung dan kedelai serta kestabilan harga untuk komoditas yang mempunyai pengaruh besar terhadap inflasi seperti cabai dan bawang merah. Fokus Pemerintah ini dapat dikatakan berhasil jika melihat tren inflasi yang tetap terjaga hingga triwulan III tahun 2021 ini bahkan masih sangat aman dari tingkat inflasi yang ditargetkan 3%.

Selain itu, jika kita lihat arah dan prioritas Pemerintah saat RKPD untuk tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jambi masih belum menjadikan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai prioritas utama untuk digenjut pertumbuhannya pada tahun ini. Jika dibandingkan sektor-sektor lain, terlihat bahwa sektor ini meskipun menjadi perhatian Pemerintah Daerah namun bukan menjadi sektor yang menjadi prioritas. Pada tahun 2021 ini, Pemerintah Daerah lebih memfokuskan pada sektor-sektor lain yang masih memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang rendah bahkan cenderung turun pada beberapa periode terakhir. 3 Sektor utama yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah misalnya adalah Perdagangan yang diharapkan tumbuh 7,97%, sektor Konstruksi diharapkan tumbuh 7,7% dan Pengadaan Listrik dan Gas yang diharapkan tumbuh 6,19%. Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ini hanya diharapkan tumbuh 2,3% agar mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,77%.

Jika dilihat dari perkembangan pelakunya, sektor pertanian dan perikanan memiliki potensi yang sangat besar sebagai

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah membuat kebijakan di tahun 2022 untuk menjadikan sektor Pertanian ini sebagai sektor prioritas. Hal ini berdasarkan pertimbangan karena melihat geliat sektor pertanian yang terus tumbuh dan membaik. Selain itu, jumlah petani yang terus berkembang di tahun 2020 sebanyak 255.506 dan tahun 2021 menjadi 324.544 juga mengharuskan Pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat agar para petani ini tetap sejahtera. Tak kalah penting, sektor pertanian ini juga sudah teruji memiliki ketahanan yang sangat tinggi bahkan ditengah kondisi pandemi. Oleh karena itu, salah satu Program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah adalah Pengembangan *Food Estate* dan Program Kampung Pangan Terpadu dengan tujuan untuk memandirikan petani secara makro. Perhatian khusus dari Pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani ke depan disamping mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dengan meningkatnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB Provinsi Jambi.

Tahun 2021 sudah menjadi awalan yang baik untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini ditandai dengan diraihnya penghargaan Abdi Bakti Tani dari Kementerian Pertanian kepada Gubernur Jambi atas capaian Ekspor Komoditi Pertanian Tertinggi ke-3 Periode Juni 2020 sampai dengan Juli 2021 dan Kategori Peningkatan Produksi Padi Tertinggi ke-5 2019-2021, yang diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden awal bulan September 2021. Hal ini diharapkan mampu menjadi *trigger* kepada stakeholder dalam pengembangan sektor pertanian di Provinsi Jambi.

Selain itu, Wakil Presiden Indonesia juga berharap agar Penganugerahan Abdi Bakti Tani 2021 dapat menjadi penyemangat para Kepala Daerah dan unsur-unsur pemerintah daerah lainnya. Karena tanpa komitmen dan pemikiran kreatif para pemimpin tersebut, roda pembangunan pertanian tak bisa berputar cepat dan memberikan hasil membanggakan.

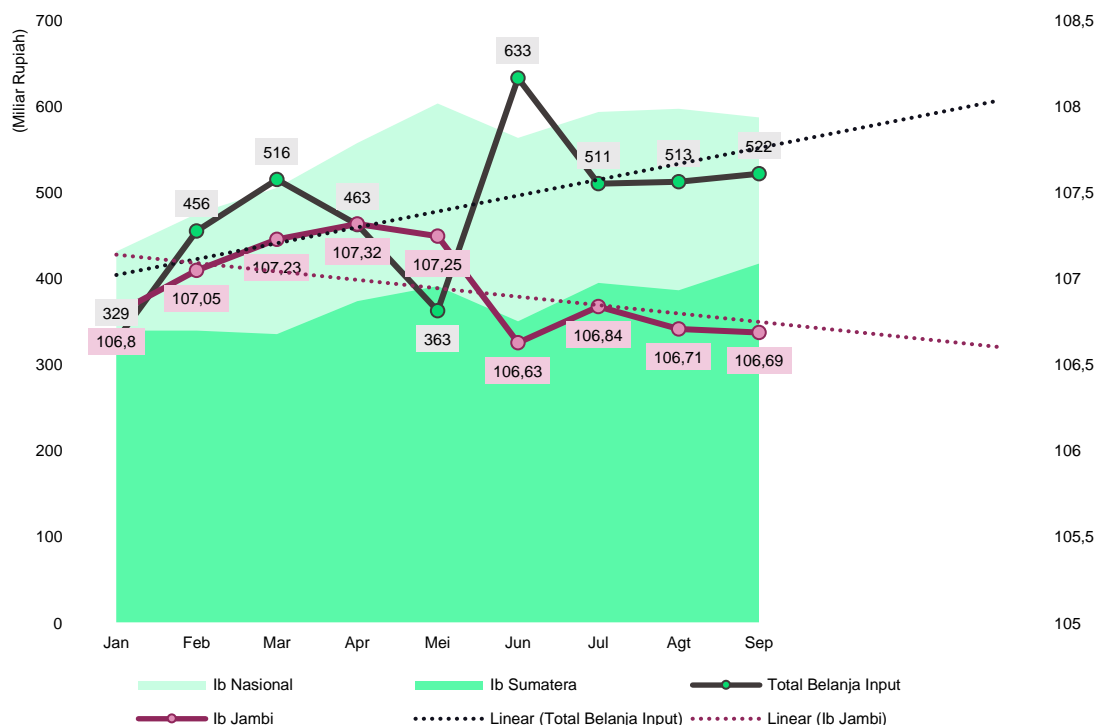
Ke depan, Pemerintah juga harus secara serius menggarap sektor hilirisasi produk. Karena hilirisasi produk ini akan memberikan dampak secara luas dan efek multiplier ekonomi yang luar biasa baik terhadap PDRB, penurunan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran. Pemerintah harus bisa melihat peluang ini dan memiliki konsistensi dalam pengembangan infrastruktur agar sektor ini benar-benar dapat diwujudkan.

Saat ini Pemerintah masih terlalu fokus pada sektor produksi. Padahal yang lebih dibutuhkan oleh para petani adalah penciptaan atau kepastian pasar, kepastian harga serta perbaikan tata niaga bisnis dan dukungan kelembagaan. Faktor-faktor ini akan lebih memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan petani dan mendukung pengembangan sektor pertanian kedepan. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang konsisten, komprehensif dan kontinu (berkesinambungan) agar sektor pertanian ini dapat menjadi dapat menjadi nilai tambah ekonomi yang besar di Provinsi Jambi.

3.1.2. Analisis Perbandingan Tren Antara Pengeluaran dengan NTP dan NTN

3.1.2.1. Analisis Harga Yang Dibayar Petani (Ib) terhadap Kebijakan Input Sektor Pertanian

Grafik III-2 Tren Harga yang Dibayar Petani (Ib) terhadap Total Belanja Input Sektor Pertanian



sumber: BPS Prov. Jambi, OM SPAN, SIKP (data diolah)

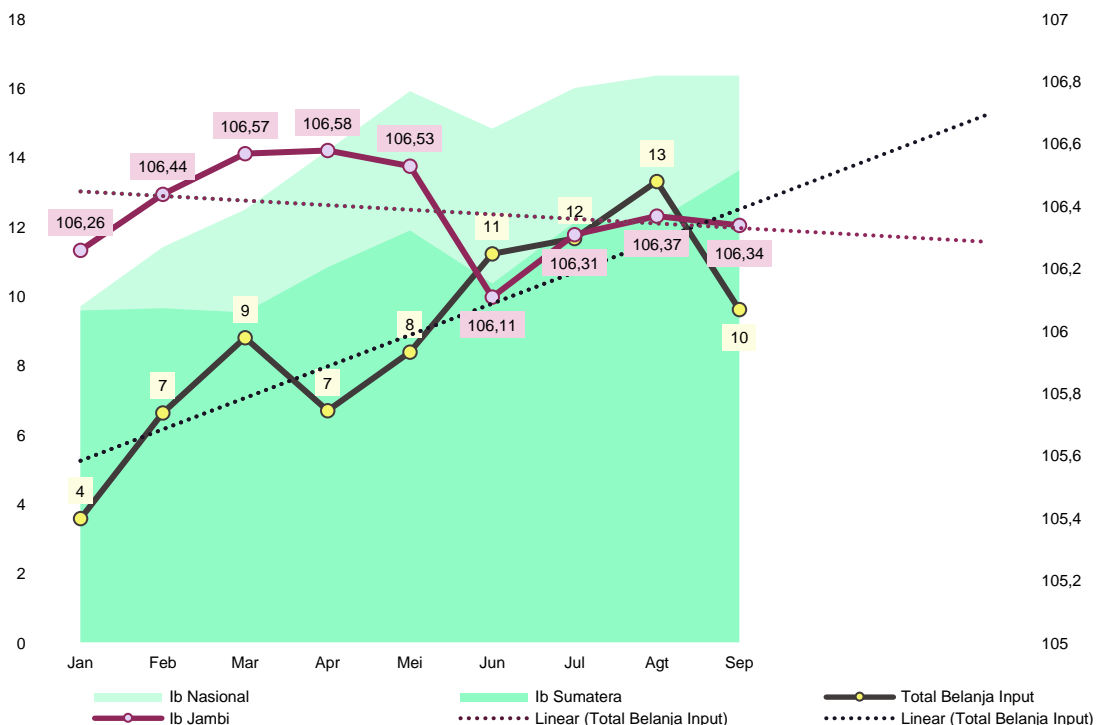
Jika kita lihat grafik diatas terlihat tren harga yang menurun untuk tahun 2021. Penurunan indeks ini jika kita bandingkan dengan tren yang meningkat dari total belanja input di sektor pertanian

menunjukkan bahwa kebijakan belanja dan pembiayaan di sektor pertanian efektif untuk menurunkan indeks harga yang dibayarkan oleh petani. Hal ini semakin terlihat jika kita bandingkan indeks Provinsi Jambi dengan indeks untuk Regional Sumatera dan Nasional. Ketika intervensi kebijakan belanja masih rendah di awal tahun terlihat bahwa indeks bayar masih cukup tinggi bahkan diatas rata-rata untuk regional Sumatera meskipun masih di bawah indeks Nasional. Namun ketika kebijakan belanja input mulai menunjukkan percepatan khususnya pada bulan Mei-Juni maka berdampak langsung dan signifikan terhadap penurunan indeks bayar. Salah satu yang cukup berpengaruh dari belanja input ini adalah realisasi DAK Fisik. Dari data yang kami kumpulkan realisasi DAK Fisik Bidang Pertanian baru direalisasikan pada bulan Mei-Juni. Meskipun porsi nya kecil jika disandingkan dengan belanja lainnya, namun DAK Fisik memiliki dampak multiplier yang besar terhadap sektor sehingga imbasnya terhadap indeks bayar cukup besar jika dibandingkan belanja input lainnya.

Jika kita lihat dari tingkat kemiringan tren, terlihat bahwa peningkatan pada belanja input di sektor pertanian memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan indeks bayar. Derajat kemiringan yang hampir sama antara belanja dan indeks menunjukkan bahwa jika belanja ditingkatkan 1% maka diharapkan mampu menurunkan indeks bayar mendekati atau bahkan lebih dari 1%.

3.1.2.2. Analisis Harga Yang Dibayar Nelayan (Ib) terhadap Kebijakan Input Sektor Perikanan

Grafik III-3 Tren Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) terhadap Total Belanja Input Sektor Perikanan



sumber: BPS Prov. Jambi, OM SPAN, SIKP (data diolah)

Sama seperti sektor pertanian, sektor perikanan juga memiliki tren indeks bayar yang terus menurun sepanjang tahun 2021. Namun jika dibandingkan dengan indeks Regional Sumatera

dan Nasional, indeks di awal tahun cukup tinggi. Penurunan indeks yang cukup besar terjadi pada bulan Mei-Juni yang disebabkan percepatan dari realisasi belanja input baik dari DAK Fisik dan Belanja K/L maupun permodalan yang disalurkan melalui KUR sektor perikanan. Penurunan yang dihasilkan inipun terbukti efektif karena mampu menurunkan indeks bayar di Provinsi Jambi hingga mampu dibawah rata-rata indeks Regional Sumatera dan Nasional.

Dampak yang dihasilkan dari belanja sektor input terhadap indeks bayar sektor perikanan memberikan dampak yang positif. Dari grafik diatas terlihat bahwa peningkatan pada belanja input akan mempengaruhi penurunan indeks bayar. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah memiliki dampak positif terhadap penurunan indeks bayar. Selain itu jika kita lihat bahwa peningkatan yang cukup besar pada belanja input juga secara signifikan akan menurunkan indeks bayar sebagaimana yang terlihat pada bulan Mei-Juni.

Namun jika kita lihat dari tingkat kemiringan tren, maka terlihat bahwa pengaruh tersebut tidak sebesar pengaruh seperti pada sektor pertanian. Peningkatan yang besar pada belanja input tidak menghasilkan penurunan yang signifikan pada indeks bayar di sektor perikanan. Hal ini perlu menjadi perhatian karena jika kita lihat tren yang terjadi pada bulan Juni-Agustus bahwa ketika belanja input terus meningkat namun belum berhasil untuk menurunkan indeks bayar. Dan sebaliknya ketika belanja input turun pada bulan September malah membuat indeks bayar juga menurun disaat indeks Regional Sumatera justru meningkat. Dengan kata lain, Pemerintah harus membuat strategi dan kebijakan yang tepat agar setiap rupiah yang dibelanjakan mampu secara efektif menurunkan indeks bayar.

3.1.3. Rekomendasi Kebijakan

Untuk pengembangan kedepan, kami berharap agar Pemerintah Daerah juga dapat memberikan perhatian untuk pengembangan komoditas yang berpotensi untuk menjadi komoditas unggulan di Provinsi Jambi. Dari data yang kami kumpulkan bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, terdapat beberapa komoditas unggul yang dapat dikembangkan antara lain Buah Duku yang telah mendapatkan penetapan dari Menteri Pertanian sebagai **Varietas Unggul Nasional** di tahun 2020. Selain itu juga penting untuk melihat potensi besar dari Buah Nanas yang memiliki pangsa pasar yang luas. Tidak hanya itu, Pemerintah juga perlu lebih memperhatikan perkembangan Hortikultura yang selama ini kurang mendapat perhatian.

1. Sanksi terhadap Pelanggar Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

Hasil diskusi dengan dinas terkait, disimpulkan bahwa Pemerintah perlu memperkuat penegakan kebijakan atas harga acuan. Pemerintah saat ini telah membuat kebijakan untuk melindungi harga produk pertanian yaitu berupa penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah atau beras. Harapan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga harga di tingkat petani dan di tingkat konsumen sehingga bisa memberikan perlindungan harga atas komoditas.

Namun sayangnya pelaksanaan dilapangan sangat berbeda. Realita dilapangan menunjukkan bahwa petani hanya bisa pasrah dengan harga yang ditentukan oleh pedagang. Karena orientasi yang diinginkan petani adalah agar modal dapat berputar dengan cepat agar siklus produksi

dapat terlaksana. Sementara itu, pedagang tidak mau membeli dengan harga yang diterapkan oleh Pemerintah. Akibatnya banyak petani yang mengeluh dan menganggap bahwa kebijakan harga yang dibuat tidak efektif untuk menjaga harga komoditas.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah belum adanya sanksi yang diterapkan bagi pelanggar harga. Hal ini sudah seringkali dikeluhkan oleh petani bahwa banyak sekali pedagang yang tidak mau mengikuti harga yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Namun tidak ada penindakan tegas dari Pemerintah atas pelanggaran tersebut sehingga praktik seperti ini terus berulang dan semakin merugikan petani.

Selain itu, kemampuan pemerintah dalam penyerapan komoditi juga terbatas. Pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menjamin penyerapan atas komoditas ketika harganya jatuh. Dampak dari hal tersebut adalah petani merasa bahwa Pemerintah berlepas tangan terhadap kebijakan yang telah dibuatnya. Dan hal ini juga dapat memicu ketidakpercayaan petani terhadap program Pemerintah di Sektor Pertanian ke depan yang tentunya dapat menghambat program pengembangan sektor pertanian ke depan.

Untuk menyikapi hal tersebut, kami **merekomendasikan** agar Pemerintah membuat penyesuaian atas kebijakan harga dan membuat sanksi yang jelas bagi pelanggar. Dengan adanya pemberian sanksi ini diharapkan kebijakan harga yang dibuat dapat memberikan jaminan bagi petani agar hasil panennya mendapatkan harga yang layak. Selain itu, dengan adanya sanksi ini dapat menjadi *benchmark* bagi Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap komoditas penting lainnya seperti jagung, kedelai, cabai merah dan bawang merah yang memiliki dampak besar terhadap inflasi di Provinsi Jambi.

2. Peningkatan Edukasi Bisnis Pertanian

Secara umum terdapat 3 kendala utama dalam pengembangan sektor pertanian. Kendala yang pertama adalah rendahnya komitmen petani. Rendahnya komitmen petani ini membuat kurangnya minat dari industri makanan terhadap produk dari Jambi. Padahal dalam kurun waktu beberapa terakhir sudah ada tawaran-tawaran yang masuk dan hingga sampai proses perjanjian kerjasama. Namun sayangnya, ditengah jalan banyak petani yang gagal memenuhi perjanjian tersebut karena melihat harga pasar yang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh rekanan.

Untuk menyikapi hal tersebut, kami **merekomendasikan** agar para petani diberikan wawasan bisnis yang cukup agar kedepannya para petani dapat menjaga komitmen bisnis serta mampu melihat berbagai peluang-peluang yang ada salah satunya dengan memanfaatkan pasar digital yang sedang menjamur saat ini. Pemerintah Daerah juga dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar para petani diberikan edukasi inklusi keuangan yang cukup agar tingkat literasi keuangan para petani semakin meningkat. Tingkat literasi keuangan yang tinggi tentunya akan mempermudah petani untuk memperoleh pendanaan maupun memperoleh kemudahan dengan banyaknya metode pembayaran yang tersedia saat ini.

3. Pengalokasian Dana Cadangan Khusus Pertanian

Kendala yang kedua adalah kurang optimalnya anggaran. Perubahan anggaran yang terus terjadi apalagi ditengah kondisi pandemi sejak tahun lalu membuat sektor pertanian ini tidak maksimal. Oleh karena itu, kami **merekomendasikan** agar pemerintah membuat kebijakan khusus untuk mengalokasikan secara tetap terkait pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Hal ini didasarkan bahwa sektor ini secara konsisten menjadi komponen terbesar pembentuk PDRB Provinsi Jambi. Sektor ini juga secara nyata mampu menyerap dan bahkan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, kami juga **merekomendasikan** agar Pemerintah membuat kebijakan yang mendukung perkembangan para petani di Daerah. Salah satunya dengan menyediakan dana cadangan khusus yang dipersiapkan untuk membeli hasil pertanian yang tidak laku dipasaran baik karena maraknya bantuan sosial yang diberikan maupun karena sebab-sebab lain seperti tingginya impor, musim panen raya yang bersamaan dan hal-hal lain sebagainya. Dengan adanya dana cadangan ini, para petani tidak perlu khawatir terjadi penumpukan barang karena tidak ada permintaan yang cukup di pasar.

4. Perluasan Pasar dan Promosi

Kendala yang ketiga adalah rendahnya permintaan pasar. Salah satu kendala terbesar yang sering dihadapi para petani di Jambi adalah adanya *supply* namun tidak ada *demand*. Secara teori ekonomi tentunya hal ini akan membuat harga barang menjadi sangat rendah atau bahkan tidak berharga padahal petani telah mengeluarkan biaya untuk memproduksi barang. Oleh karena itu, kami **merekomendasikan** agar pemerintah turut serta dalam menyediakan *demand* tersebut baik melalui kebijakan di Internal maupun eksternal. Selain itu, dapat juga diberikan bantuan promosi serta mengadakan kegiatan atau event tertentu yang dapat menjadi *trigger* bagi komoditas hasil pertanian dari Provinsi Jambi.

Selain untuk menjawab tantangan tersebut, kami juga ingin **merekomendasikan** beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan. Beberapa strategi tersebut antara lain:

5. Alokasi dan Eksekusi Anggaran Berbasis Data (Data Driven)

Saat ini, alokasi anggaran di APBN maupun APBD bidang pertanian/perikanan masih terbatas dan masih memegang porsi yang belum signifikan dalam pengembangan sektor pertanian di wilayah Provinsi Jambi. Di tengah terbatasnya kemampuan Pemerintah dalam mengintervensi salah satu sektor kunci perekonomian di wilayah ini, kami merekomendasikan agar kebijakan pengalokasian dana yang tersedia berbasis data dan informasi pertanian/perikanan. Misalnya alokasi dana untuk penyuluh pertanian difokuskan pada desa yang menjadi sentra produksi dan penghasil komoditi, serta pengembangan varietas unggul tanaman hortikultura yang memiliki pangsa pasar yang potensial. Di samping itu, *timing* eksekusi/realisasi anggaran seyogyanya memperhatikan kondisi ekonomi regional, inflasi, ketersediaan stok pangan, kondisi pasar komoditi, serta perkembangan harga komoditi level global. Salah satu peran Kanwil Ditjen

Perbendaharaan selaku Regional Chief Economist yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemda adalah forum Aset Liability Committee (ALCO) Regional.

6. Pemanfaatan Jasa Resi Gudang

Sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor yang sangat rentan pada perubahan harga komoditas di pasar. Petani dan nelayan butuh harga yang wajar agar cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kebutuhan hidupnya. Salah satu cara untuk melindungi petani dari perubahan harga tersebut adalah pemanfaatan suatu lembaga penjaminan resi gudang.

Melalui sistem resi gudang, petani tidak harus menjual komoditasnya pada saat panen. Komoditas hasil panen dapat disimpan terlebih dahulu di dalam gudang dan baru dijual ketika harganya lebih kompetitif. Gudang tempat penyimpanan komoditas merupakan gudang yang telah mendapat izin dari Kementerian Perdagangan. Setelah menyimpan komoditasnya di gudang, petani mendapatkan resi (*warehouse receipt*) yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Pembiayaan dari bank ini telah mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah melalui Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG).

Komoditas yang dapat disimpan dalam skema resi gudang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 14 Tahun 2021. Komoditas tersebut yang terdapat di Provinsi Jambi antara lain gabah, beras, jagung, kopi, kakao, teh, bawang merah, ikan, dan kedelai. Meskipun tidak semua komoditas dihasilkan secara masif di seluruh Kabupaten/Kota, Pemerintah dapat melakukan uji coba untuk hasil pertanian/perkebunan unggulan sebagai *pilot project* dan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan bagi petani lainnya.

Pemanfaatan resi gudang ini dapat menjadi pertimbangan untuk dapat diimplementasikan. Hal ini karena mengingat alokasi APBN dan APBD di sektor pertanian masih sangat terbatas sehingga membatasi ruang gerak Pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan di sektor Pertanian. Tentunya diperlukan proses yang cukup panjang untuk mengimplementasikan sistem ini, karena melibatkan banyak pihak seperti Petani/Kelompok Tani, Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Keuangan, Penilai dan Badan Pengawas. Namun jika berhasil skema ini dapat memberikan dampak yang positif untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan karena tidak lagi khawatir terhadap risiko perubahan harga.

3.2. Analisis Peluang Investasi Daerah

3.2.1. Identifikasi Peluang Investasi

3.2.1.1. Latar Belakang Kebutuhan Investasi

Sebagai daerah yang memiliki ketergantungan cukup besar di Sektor Agraria, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 yang memuat tentang distribusi wilayah Provinsi Jambi yang sebagiannya diperuntukkan bagi kegiatan perekonomian. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud maka ditetapkan ditetapkan kebijakan dalam penataan ruang wilayah provinsi sebagai berikut:

a) pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan antara wilayah barat, tengah

- dan timur;
- b) pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah;
 - c) optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah;
 - d) penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah;
 - e) penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan; dan
 - f) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Potensi serta peluang investasi yang ada di Jambi bisa dilihat dari strategi yang digunakan pada keenam kebijakan tersebut. Misalnya untuk pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah barat dan timur, dilakukan strategi pengembangan jalan arteri primer, kereta api dan sarana pendukungnya, peningkatan akses ke kawasan budi daya melalui peningkatan jalan kolektor primer, peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam di masing-masing wilayah melalui pengolahan produk pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan.

Strategi pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui pola intensifikasi pertanian, perkebunan dan kehutanan dan pengembangan kawasan agropolitan yang dilengkapi fasilitas perdagangan dan jasa pendukungnya serta dengan meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa infrastruktur dan sarana pendukung lainnya. Strategi optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya dilakukan melalui pengembangan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan. Kawasan peruntukan hutan produksi, peruntukan perkebunan, peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura misalnya, terdistribusi di seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Jambi. Sedangkan untuk kawasan pertambangan misalnya tersebar pada hampir seluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Untuk pengembangan budidaya pertanian dibagi menjadi beberapa sub sektor. Pembagian tersebut yakni:

- a. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan distribusi pengembangan tersebar merata di seluruh kabupaten/kota;
- b. Peternakan; dan
- c. Perikanan. Untuk kawasan perikanan laut (tangkap) terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan kawasan budidaya ikan danau terletak di Kabupaten Kerinci. Untuk budidaya ikan sungai dan tambak terdistribusi ke seluruh Kabupaten/Kota di Jambi.

Peruntukan kawasan industri yang terdiri dari antara lain industri kehutanan, industri pertanian, industri gas dan kondensat, industri perikanan dan hasil laut, industri perkebunan, industri logam, industri migas dan batubara, industri galangan kapal, industri manufaktur, industri kimia, serta industri biodiesel, diarahkan dan disebar sesuai potensi masing masing Kabupaten/Kota.

Dengan segala potensi dan peta pengembangan tersebut, di tahun 2021 ini investasi di Provinsi Jambi difokuskan pada hilirisasi produk dan pariwisata. Hilirisasi produk menjadi prioritas karena diharapkan mampu memberikan nilai tambah serta mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Sedangkan sektor

3.2.1.2. Uraian dan Nilai Kebutuhan Investasi

Berdasarkan ketersediaan data dan kesiapan analisis, tim penyusun memilih untuk memfokuskan pembahasan pada peluang investasi yang terdapat di Kabupaten Kerinci. Secara geografis Kabupaten Kerinci terletak pada 01° 40' – 02° 26' Lintang Selatan dan 101° 08' – 101° 50' Bujur Timur dengan beribukota di Sungai Penuh yang berjarak 418 Km dari Kota Jambi. Luas wilayah kabupaten ini adalah 332.814 ha dan merupakan kabupaten terkecil kedua di antara kabupaten/kota di Provinsi Jambi (\pm 7,86% dari total provinsi).

Kabupaten Kerinci terletak di kawasan Bukit Barisan dengan ketinggian 500 – 1.500 meter di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22°C dengan suhu maksimum 28,8°C yang terjadi pada bulan Mei, dan suhu minimum sebesar 16,9°C yang terjadi pada bulan Juli. Curah hujan rata-rata per bulan adalah 86 mm³ dan kelembaban rata-rata 82,82 mmHg.

Kabupaten Kerinci merupakan daerah yang subur dengan lahan yang terbatas. Dari luas wilayah Kerinci secara keseluruhan, 52% merupakan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, hanya sekitar 48% merupakan kawasan budidaya atau kurang dari 4% dari seluruh wilayah Provinsi Jambi. 205.000 ha merupakan kawasan budidaya, 163.380 ha untuk lahan pertanian, dan 41.620 ha (20,56%) berupa kawasan non-pertanian.

Alternatif potensi yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pembangunan harus digali, terutama dengan memanfaatkan potensi alam yang mengandung keindahan dan menarik wisatawan untuk berkunjung. Hingga saat ini, terdapat 5 (lima) potensi ekonomi di kabupaten ini. 3 (tiga) diantaranya terdapat pada sektor pertanian dengan subsektor perkebunan yaitu Kopi Arabika Kerinci, bawang merah dan jenis cabai yang disebut “Lombok Kerinci”. Kemudian yang keempat adalah sektor pariwisata dengan objek wisata yang banyak terdapat di kabupaten ini. Kelima adalah sektor energi dengan kekhususan yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu energi panas bumi (geothermal) dan energi air.

Sektor yang akan menjadi fokus pada kajian ini adalah sektor pariwisata. Potensi wisata di kabupaten ini cukup banyak seperti Danau Kerinci, Air Terjun Pendung Semurup, Air Terjun Sungai Medang 14 Tingkat, Danau Kaco di Lempur, Air Terjun Pancuran Rayo, Pulau Tengah, dan sebagainya. Tempat wisata yang paling banyak dikunjungi adalah air terjun bertingkat di Talang Kemulun dan air terjun di Kecamatan Batang Merangin. Ada pula wisata gua yang belum banyak diketahui dan dikunjungi wisatawan. Potensi wisata yang telah dikelola saat ini adalah di Kayu Aro, Gunung Tujuh, Danau Kerinci, Air Panas Semurup, dan beberapa tempat lainnya.

Selama ini untuk wilayah Kerinci kunjungan wisatawan masih didominasi oleh wisatawan domestik dan hanya ada beberapa wisatawan asing. Jika semua potensi pariwisata dikelola oleh Pemerintah Daerah, tentu PAD di sektor pariwisata akan meningkat secara signifikan.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* dan *Workshop* antara BKPM, Pemerintah Daerah, dan DPMPSTSP Kabupaten Kerinci, serta berdasarkan analisis kelayakan ekonomi oleh tim ahli, peluang investasi yang akan dipilih untuk Kabupaten Kerinci adalah pengembangan fasilitas di Danau Tempat wisata Kerinci. Salah satu pertimbangan pengambilan arah peluang investasi tersebut adalah karena Kabupaten Kerinci sendiri tidak dapat dilepaskan dengan kata pariwisata. Banyak hal yang bisa dinilai sebagai daya tarik Kabupaten Kerinci. Diantara keunikan budaya tersebut kini dikemas dalam festival budaya tahunan yang disebut "Festival Danau Kerinci". Pemerintah Kabupaten Kerinci ingin memanfaatkan Danau Kerinci sebagai salah satu tujuan wisata utama wilayah Kabupaten Kerinci.

Pembangunan tersebut direncanakan untuk pembangunan *cottage* sebanyak 40 unit, pembuatan kolam pancing, kolam renang, pengembangan fasilitas *outbound*, pembelian alat rekreasi air, termasuk fasilitas pendukung mulai dari akses jalan, fasilitas parkir, kesehatan, mini market, dan lain-lain. Detil kebutuhan investasi ini dapat dilihat pada akhir Bab III KFR ini.

Berdasarkan hasil perhitungan dan perencanaan pengembangan, total investasi yang dibutuhkan adalah sebesar 22,41 Miliar Rupiah. Perhitungan kebutuhan ini menggunakan asumsi Index Harga Pembangunan di Kabupaten Kerinci yang berada di angka 97,14% atau sekitar 4.396.000/m².

3.2.2. Informasi Pasar

Danau Kerinci merupakan danau terbesar di Kabupaten Kerinci. Danau ini adalah sebuah danau yang terletak di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Kerinci. Memiliki luas 5.000 meter persegi dengan ketinggian 783 meter di atas permukaan laut. Danau ini terletak di kaki Gunung Rayo sekitar 16 (enam belas) kilometer di sebelah selatan Kota Sungai Penuh antara 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Keliling Danau dan Kecamatan Danau Kerinci. Danau Kerinci merupakan danau vulkanik yang memiliki kedalaman 110 meter.

Berdasarkan data BPS Kab. Kerinci tahun 2018, jumlah wisatawan yang masuk ke Kabupaten Kerinci tahun 2011 mencapai 29.255 yang terdiri dari 157 wisatawan mancanegara (wisman) dan 29.098 wisatawan nusantara (wisnus). Sedangkan pada tahun 2019, jumlah wisatawan ini meningkat menjadi 230.920 atau 87,40%, terdiri dari 7.661 wisman dan 223.259 wisnus. Kemudian di tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pengunjung menjadi 161.789 yang terdiri dari 138 wisman dan sisanya yaitu 161.651 wisnus. Sementara di tahun 2021, ditargetkan jumlah kunjungan wisata mencapai 295.000 orang.

Danau Kerinci memiliki pengaruh yang besar dalam memenuhi kebutuhan air di wilayah sekitar Danau Kerinci. Kabupaten Kerinci tidak bisa lepas dari kata pariwisata. Banyak hal yang bisa menjadi daya tarik Kabupaten Kerinci, yakni keunikan budaya yang kini dikenal sebagai festival budaya tahunan yang disebut "Festival Danau Kerinci". Pemerintah secara rutin mengadakan "Festival Danau Kerinci" sejak tahun 2017 hingga terakhir untuk tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 7-9 November yang lalu.

Kawasan di sekitar Danau Kerinci memiliki potensi untuk berbagai aktifitas. Tempat ini dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi air yang menarik untuk memancing, berenang, berkemah, atau melakukan aktivitas lainnya seperti makan makanan khas Kabupaten Kerinci di restoran-restoran di sekitar Danau Kerinci.

Konsep perencanaan pengembangan potensi wisata Danau Kerinci adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan tema yang tepat terkait dengan potensi yang dimiliki;
- 2) Fasilitas yang dibutuhkan untuk kawasan wisata Danau Kerinci;
- 3) Penempatan sarana atau prasarana rekreasi yang mengacu pada sistem zonasi akan lebih membantu untuk mengelompokkan aktivitas pengunjung pada satu lokasi;
- 4) Sistem jaringan jalan di kawasan wisata Danau Kerinci merupakan faktor penting bagi kenyamanan dan keamanan pengunjung di kawasan Danau Kerinci;
- 5) Fasilitas di kawasan perlu mengutamakan kenyamanan pengunjung dimana suasananya yang diciptakan dapat memenuhi kebutuhan wisatawan antara lain adanya keragaman rekreasi dan atraksi, kuliner khas yang enak, resor/pondok yang bersih. Pelayanan prima dari tingkat manajemen kepada pengunjung harus menjadi citra terhadap kawasan sehingga memberi daya tarik yang kuat bagi pengunjung untuk mengunjungi daerah tersebut. Tempat ini juga perlu memiliki nilai tambah diantaranya kemampuan untuk mengelola berbagai kegiatan (*event organizing*). Pengayaan pertunjukan seni lokal juga diharapkan mampu mendorong wisatawan untuk kembali berkunjung.

3.2.3. Analisis Kelayakan

3.2.3.1. Analisis Arus Kas

Arus Kas Masuk (*Cash Inflow*)

Arus kas masuk merupakan pendapatan dari investasi. Arus kas masuk ini diperhitungkan dengan memperhatikan beberapa aspek yang menjadi sumber pendapatan antara lain sewa *cottage*, *outbond*, *camping ground*, rekreasi air, dan memancing. Perhitungan kas masuk menggunakan asumsi sebagai berikut:

- 1) Periode Investasi : 10 tahun;
- 2) Hari Kerja : 20 hari kerja per bulan;
- 3) Tingkat Hunian/Penggunaan Fasilitas : 20% pada tahun pertama, 50% pada tahun kedua dan 80% untuk tahun ketiga dan seterusnya;
- 4) *Cottage* : rate 1 Juta Rupiah/malam, kapasitas 2 – 4 orang;
- 5) *Outbound* : 150.000 Rupiah/orang, peserta minimal 20 orang;
- 6) *Camping Ground* : 350.000 Rupiah/hari;
- 7) Rekreasi Air : 50.000 Rupiah/30 menit untuk 2 orang;
- 8) Memancing : 50.000 Rupiah/orang;
- 9) Pendapatan dari penjualan cinderamata dan supermarket 5 Juta Rupiah/bulan;
- 10) Estimasi pendapatan dari restoran 5% dari total kamar yang disewa.

Dengan asumsi-asumsi tersebut, diperkirakan arus kas yang masuk pada tahun pertama adalah sebesar 2,66 Miliar Rupiah. Sementara untuk tahun kedua diestimasi sebesar 6,65 Miliar Rupiah. Sedangkan untuk tahun ketiga dan seterusnya diperkirakan mampu mencapai 10,63 Miliar Rupiah/tahun. Detil total estimasi kas masuk dapat dilihat pada akhir bab III KFR ini.

Arus Kas Keluar (Cash Outflow)

Arus kas keluar merupakan pengeluaran untuk aktivitas investasi yang terjadi dari aktivitas transaksi yang mengakibatkan beban kas. Terdiri dari gaji pegawai yang terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pondok. Perhitungan kas keluar menggunakan asumsi sebagai berikut:

- 1) Biaya Pemeliharaan Tahunan ditetapkan sebesar 3% dari investasi;
- 2) Biaya Operasional Restoran Tahunan ditetapkan sebesar 30% dari nilai penjualan restoran;
- 3) Biaya Administrasi dan Penjualan Tahunan ditetapkan sebesar 1% dari total penjualan, termasuk semua biaya yang terkait dengan kegiatan administrasi dan pemasaran.

Dengan asumsi-asumsi tersebut, diperkirakan kas yang dikeluarkan untuk tahun pertama adalah sebesar 2,58 Miliar Rupiah. Sedangkan untuk tahun kedua diperkirakan keluar sebesar 2,63 Miliar Rupiah. Tahun Ketiga diestimasi mengeluarkan biaya sebesar 2,71 Miliar Rupiah. Dan di tahun keempat dan seterusnya diperkirakan akan mengeluarkan biaya sebesar 2,75 Miliar Rupiah/Tahun. Detil total estimasi kas keluar dapat dilihat pada lampiran KFR ini.

Arus Kas Netto

Berdasarkan asumsi dan informasi diatas, berikut adalah proyeksi arus kas bersih untuk investasi tersebut selama 10 tahun berdasarkan nilai saat ini (asumsi suku bunga 12%/tahun):

Tabel III-8 Proyeksi Keuntungan

(dalam Juta Rupiah)

Uraian	Tahun											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kas Masuk	-	2.658	6.645	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632
Kas Keluar	(22.409)	(2.583)	(2.628)	(2.714)	(2.754)	(2.754)	(2.754)	(2.754)	(2.754)	(2.754)	(2.754)	(2.754)
Kas Bersih	(22.409)	75	4.017	7.918	7.878	7.878	7.878	7.878	7.878	7.878	7.878	7.878
Kas Bersih Kumulatif	(22.409)	(22.333)	(18.317)	(10.399)	(2.521)	5.357	13.235	21.113	28.991	36.868	44.746	

Sumber: BKPM Kabupaten Kerinci

3.2.3.2. Analisis Kelayakan dan Profitabilitas

Berdasarkan proforma arus kas bersih dan profitabilitas dari investasi ini, arus kas bersih kumulatif kegiatan investasi ini meningkat dari waktu ke waktu dan mencapai angka positif setelah tahun keempat menuju tahun kelima berjalannya proyek (perhitungan terlampir). Analisis Kelayakan Finansial dilakukan dalam rangka perencanaan investasi untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat kelayakan finansial dari pelaksanaan pembangunan di suatu kawasan. Analisis Kelayakan Finansial dilakukan dengan mengolah data menggunakan kriteria kelayakan investasi *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Net Benefit-Cost Ratio* (NBCR), dan *Payback Period* (PP).

Dari hasil perhitungan yang terdapat pada akhir Bab III KFR ini, diperoleh nilai dari masing-masing kriteria kelayakan investasi sebagai berikut:

Net Present Value (NPV)

Jika dilihat dari hasil perhitungan NPV, proyek ini termasuk kategori layak. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan NPV dari Arus Kas Bersih dengan asumsi tingkat bunga 12% menghasilkan hasil positif sebesar 12,09 Miliar Rupiah. Dengan kata lain, jika investasi ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka dalam 10 tahun akan memberikan keuntungan senilai 12,09 Miliar Rupiah bagi investor. Pengembalian yang positif ini tentunya akan menjadi daya tarik yang positif bagi investor bahwa investasi yang akan dilakukan ini akan menghasilkan pendapatan selama periode investasi.

Internal Rate of Return (IRR)

Jika dilihat dari hasil perhitungan IRR, proyek ini termasuk kategori layak. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan FIRR dengan asumsi tingkat bunga 12% menghasilkan angka 21,49%. Angka IRR yang lebih besar dari tingkat asumsi bunga menunjukkan bahwa proyek ini layak dan memberikan keuntungan jika dilaksanakan. Dengan kata lain, NPV proyek ini baru akan menjadi 0 jika asumsi suku bunga yang digunakan adalah 21,49%. Dan angka tersebut masih sangat jauh dari asumsi tingkat suku bunga yang digunakan dalam perhitungan sehingga investasi ini tergolong aman dan menguntungkan.

Net Benefit/Cost Ratio (NBCR)

Jika dilihat dari hasil perhitungan BCR, proyek ini termasuk kategori layak. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan BCR menghasilkan rasio sebesar 1,32 sehingga dapat dikatakan bahwa proyek ini layak dijalankan dengan potensi memberikan keuntungan. Rasio 1,32 menunjukkan bahwa benefit yang diberikan dari investasi ini lebih besar dari cost yang dikeluarkan.

Masa Pengembalian (Payback Period)

Jika dilihat dari hasil perhitungan masa pengembalian, proyek ini membutuhkan waktu selama 4,68 tahun. Perhitungan ini menunjukkan bahwa dengan jumlah investasi awal sebesar 22,41 Miliar tersebut akan balik modal dalam waktu 4 tahun 9 bulan. Jumlah ini tentunya jauh lebih kecil dari rencana periode investasi yang dilaksanakan selama 10 tahun. Dengan kata lain, proyek ini layak untuk dilaksanakan karena memiliki waktu pengembalian lebih cepat dari waktu investasi.

3.2.4. Faktor yang Berpengaruh terhadap Investasi

Agar investasi ini dapat berjalan dengan lancar, terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap kelancaran proyek maupun kelancaran investasi ke depan. Beberapa faktor tersebut antara lain:

3.2.4.1. Faktor yang Berpotensi menjadi Pendukung Investasi

Kemudahan Akses

Danau Kerinci saat ini sudah memiliki keuntungan dari sisi kemudahan akses. Jalur darat yang saat ini tersedia untuk menuju Kota Sungai Penuh hampir dipastikan akan melewati Danau Kerinci. Sehingga saat ini Danau Kerinci sudah memiliki keunggulan dari sisi posisi yang strategis dan kepastian *traffic* atau lalu lintas kendaraan.

Posisinya yang berada di pinggir jalan juga menjadi keuntungan tersendiri pada saat pelaksanaan proyek. Hal ini karena distribusi barang dan material yang akan digunakan untuk pembangunan tidak akan menemui kendala yang berarti. Kemudahan ini tentunya akan mempermudah pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memindahkan barang ataupun material yang diperlukan sehingga biaya menjadi lebih efisien.

Dukungan Pemerintah

Meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki saat ini, Pemerintah secara rutin tetap melaksanakan Festival Danau Kerinci setiap tahun. Pelaksanaan Festival ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk terus memajukan pariwisata di Kabupaten Kerinci dan sebagai *trigger* bagi investor untuk melihat potensi besar dari Danau Kerinci itu sendiri.

Konsep pelaksanaan Festival Danau Kerinci ini juga sejalan dengan konsep pengembangan investasi Danau Kerinci ke depan. Festival Danau Kerinci ini dilaksanakan sebagai kolaborasi antara aspek wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah dan tentunya wisata kuliner. Selain itu, pelaksanaan secara rutin festival Danau Kerinci ini juga semakin menunjukkan potensi yang besar bahwa Danau Kerinci mampu jika memang serius untuk dikembangkan. Baik itu pengembangan untuk rekreasi air maupun untuk *event-event* tertentu dengan suasana yang khas.

3.2.4.2. Faktor yang Berpotensi menjadi Penghambat Investasi

Sarana dan Prasarana

Salah satu sarana utama yang perlu menjadi perhatian adalah jalan. Akses jalan ke Kabupaten Kerinci perlu dikelola dengan lebih baik. Hal ini karena akses melalui jalur darat masih menjadi pilihan utama bagi wisatawan. Kondisi jalan yang baik serta mitigasi terhadap bencana khususnya tanah longsor harus menjadi perhatian dan prioritas agar wisatawan dapat berkunjung dengan aman dan nyaman.

Selain pengembangan jalan, kemudahan transportasi melalui jalur udara juga perlu mendapatkan perhatian. Meskipun saat ini Kabupaten Kerinci sudah dapat diakses melalui pesawat melalui Bandara Depati Parbo yang terdapat di Kota Sungai Penuh, namun frekuensi terbang serta ketersediaan jadwalnya masih sangat terbatas sehingga jarang menjadi pilihan bagi wisatawan. Selain itu, dengan jaraknya yang cukup jauh dari Kota Jambi harusnya menjadi peluang tersendiri untuk pengembangan akses transportasi udara.

Lingkungan

Pengelolaan di sekitar Danau Kerinci juga perlu ditingkatkan. Saat ini daerah sekitar Danau Kerinci masih digunakan sebagai kolam warga dan tersebar luas di lokasi danau. Penataan yang baik serta sosialisasi yang tepat harus dilakukan agar tidak terjadi penolakan dari warga sekitar karena akan dianggap mengganggu keberlangsungan mata pencaharian mereka.

Untuk pengembangan ke depan kolam-kolam tersebut dapat dikelompokkan atau bahkan dikelola dengan metode bagi hasil agar lebih tertata dan menarik juga sebagai sumber penghasilan tambahan bagi warga sekitar. Selain itu, proses pemberian pakan ikan, ataupun proses-proses tradisional lainnya bisa menjadi atraksi khas sendiri yang mampu menarik pengunjung dan menjadi nilai tambah bagi pengembangan kawasan wisata Danau Kerinci ini.

Pemasaran

Selain itu, perlu juga melakukan optimalisasi fasilitas pariwisata seperti pemanfaatan area pameran dan pusat bisnis komoditas khas daerah yang sudah ada di Danau Kerinci. Pemusatan ini akan mempermudah wisatawan yang ingin mencari cinderamata untuk dibawa pulang. Pemusatan ini juga membantu pihak-pihak terkait untuk lebih fokus dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha karena telah memiliki target market dan lini usaha yang jelas.

Selain itu untuk menambang jumlah kunjungan, perlu pula dipertimbangkan untuk menambah jumlah travel agent yang ada. Hal ini dibutuhkan karena kedepan tentunya akan semakin banyak kegiatan yang diagendakan oleh Pemda Kerinci. Dengan bertambahnya jumlah travel agent yang tersedia akan mempermudah wisatawan yang akan berkunjung terutama yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Penambahan travel agent ini juga tentunya dapat menjadi potensi tambahan dari pengembangan daerah wisata Danau Kerinci karena penumpang dapat diajak singgah untuk menikmati kuliner yang tersedia ataupun hanya sekedar beristirahat dan menikmati suasana.

3.2.5. Penutup

Dari analisis di atas dapat diketahui bahwa proyek tersebut potensial untuk dibiayai melalui skema investasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (PP 63/2019). Skema investasi yang paling mungkin diterapkan adalah skema investasi langsung dalam bentuk pemberian pinjaman. Selain bahwa Skema Pinjaman merupakan skema yang telah lazim dipergunakan Pemerintah Daerah untuk mengakses sumber-sumber pendanaan, Pemerintah Kabupaten Kerinci juga memiliki track record pernah melakukan pinjaman kepada Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, dalam melakukan Pinjaman Daerah, harus memenuhi persyaratan:

1. Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya;
2. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan

3. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Selain itu, kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah serta untuk pinjaman jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Nilai proyek yang akan dibiayai, yaitu 22,4 milyar hanya berkisar 3,06% dari seluruh penerimaan umum APBD tahun 2020. Sedangkan ditinjau dari rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah (*Debt Service Coverage Ratio/DSCR*), angkanya berkisar pada 2,2 sampai dengan 2,4, lebih rendah dari ketentuan sebesar $\geq 2,5$. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, untuk dapat mencapai batas minimal *DSCR*, Pemerintah Kabupaten Kerinci dapat melakukan perhitungan kembali nilai proyek menjadi pada kisaran 19,7 s.d Rp 21,5 milyar. Perhitungan detail disajikan sebagai berikut:

Tabel III-9 Simulasi Pembiayaan Proyek Peluang Investasi Daerah untuk Kabupaten Kerinci
(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2019	2020
PAD	85,904	81,666
DAU	612,248	567,860
DBH - DBH DR	58,726	66,200
Belanja Wajib	699,622	663,141
Pokok Pinjaman	22,409	22,409
Bunga	1,457	1,457
(PAD+DAU+DBH-BW)	57,256	52,584
Pokok + Bunga	23,809	23,809
DSCR	2,40	2,20

Asumsi:

Nilai Proyek 22,409 milyar

Tenor 10 Tahun

Acuan Bunga adalah Coupon SUN Seri Benchmark 10 tahun 6,5%

Berdasarkan histori pinjaman, Pemerintah Kabupaten Kerinci pernah memiliki 2 (dua) perjanjian pinjaman kepada Pemerintah Pusat. Pinjaman tersebut telah berstatus lunas (tidak memiliki hak tagih kepada Pemerintah Pusat), dengan rincian:

NO	URAIAN	RDA-319/DP3/2002	SLA-652/DDI/1992
1	Plafon Pinjaman	9.114.000.000	288.000.000
2	Realisasi Penarikan	9.097.090.000	79.193.177
3	Jangka waktu/masa tenggang	10 th / 1 th	20 th / 5 th
4	Bunga/Biaya Administrasi	11,5%	9,25% (termasuk jasa bank 0,25%)
5	Peruntukan Pinjaman	Pembiayaan Peremajaan Pasar Beringin 3 Sungai Penuh	West Java & Sumatera Secondary Cities Urban Development (Sector) Project
6	Status	Lunas dengan restrukturisasi	Lunas

Sumber: Direktorat SMI Ditjen Perbendaharaan (data diolah)

Dari ketiga aspek tersebut, dengan melakukan penghematan dan rasionalisasi kembali terhadap nilai proyek, sesuai ketentuan yang ada, Pemerintah Kabupaten Kerinci **dimungkinkan** melakukan Pinjaman Daerah untuk membiayai proyek pengembangan pariwisata tersebut.

Keindahan alam dan keanekaragaman budaya serta lokasi yang strategis merupakan potensi yang dapat mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warganya melalui pengembangan disektor pariwisata. Banyaknya destinasi pariwisata di Kabupaten Kerinci yang potensial apabila dilihat dari sisi daya tarik alam dan budaya yang dimiliki, namun belum bisa dijual karena belum dapat bersaing dengan destinasi lain dikawasan regional maupun internasional.

Salah satu upaya pengembangan kepariwisataan adalah dengan memanfaatkan potensi kepariwisataan. Adapun untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah harus mengacu pada apa yang dicari oleh wisatawan. Umumnya diketahui bahwa modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yakni alam, kebudayaan, dan masyarakat itu sendiri. Kabupaten Kerinci yang memiliki potensi wisata yang sangat besar untuk lebih dikembangkan dari yang telah ada saat ini, disebabkan pembangunan di kabupaten ini belum optimal untuk sektor pariwisata. Dalam hal ini wisata air pada Danau Kerinci adalah salah satu potensi yang harus dikembangkan terlebih dahulu, mengingat sampai saat ini Danau Kerinci ini belum difungsikan secara optimal sebagai sarana wisata air yang bernuansa budaya.

Tabel III-10 Rincian Kebutuhan Investasi

(dalam Ribu Rupiah)

Uraian	Volume		QTY (paket)	Total Area (m2)	Unit Price (Rp.)	Total Price (Rp) sblm PPN
	Panjang	Lebar				
Jalan dan Lanskap	1.000	2		2.000	1.319	2.637.351
Fasilitas Parkir	20	10		200	2.198	439.559
Fasilitas Listrik			1	1	60.000	60.000
Fasilitas Air Bersih dan Air Limbah			1	1	100.000	100.000
Fasilitas Sampah			1	1	5.000	5.000
Fasilitas Dok Kapal	10	5		50	2.198	109.890
Fasilitas Kesehatan	6	5		30	4.396	131.868
Cottage (40 unit)	8	320		2.560	4.396	11.252.698
Kolam Pancing	7	16		112	1.099	123.076
Kolam Renang	20	10		200	2.198	439.559
Mini Market	10	10		100	4.396	439.559
Restoran	20	20		400	4.396	1.758.234
Panggung Hiburan	10	10		100	879	87.912
Taman Rekreasi	20	20		400	879	351.647
Taman Petualangan Keluar	50	50		2.500	440	1.098.896
Perahu			10	10	5.000	50.000
Pusat Informasi	6	5		30	4.396	131.868
Kantor Manajemen	10	5		50	4.396	219.779
Pos satpam	6	5		30	4.396	131.868
Mobil Minibus Daihatsu Grandmax			2	2	170.000	340.000
Modal kerja			1	1	2.500.000	2.500.000
Total						22.408.764

Sumber: BKPM (data diolah)

Tabel III-11 Proforma Arus Kas Masuk

(dalam Miliar Rupiah)

Arus Kas Masuk	Estimasi Bulanan	Tahun											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sewa Cottage	800	0	1.920	4.800	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
Pemancingan	50	0	120	300	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Kolam Renang	60	0	144	360	576	576	576	576	576	576	576	576	576
Penjualan Mini Market	100	0	240	600	960	960	960	960	960	960	960	960	960
Outbound	30	0	72	180	288	288	288	288	288	288	288	288	288
Wisata Air	25	0	60	150	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Penjualan Restaurant	-	0	102	255	408	408	408	408	408	408	408	408	408
Total Kas Masuk		0	2.658	6.645	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632

Sumber: BKPM (data diolah)

Tabel III-12 Proforma Arus Kas Keluar

(dalam Miliar Rupiah)

Arus Kas Keluar	Tahun												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Gaji Pegawai	0	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
Biaya Pemeliharaan	0	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739
Biaya Restaurant	0	31	77	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
Biaya Penjualan & Adm	0	27	27	66	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Total Kas Keluar		2.583	2.628	2.714	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754

Sumber: BKPM (data diolah)

Tabel III-13 Proforma Arus Kas Netto

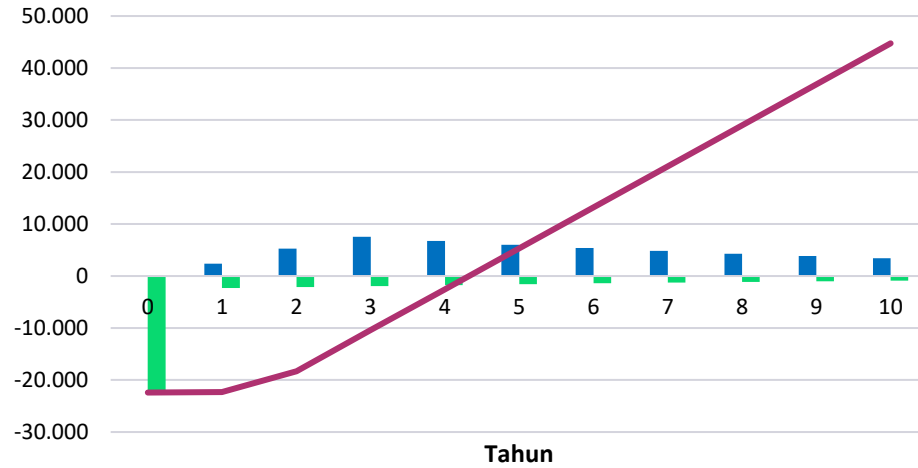
(dalam Juta Rupiah)

Arus Kas Masuk	Tahun										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sewa Cottagge		1.920	4.800	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
Pemancingan		120	300	480	480	480	480	480	480	480	480
Kolam Renang		144	360	576	576	576	576	576	576	576	576
Penjualan Mini Market		240	600	960	960	960	960	960	960	960	960
Outbound		72	180	288	288	288	288	288	288	288	288
Wisata Air		60	150	240	240	240	240	240	240	240	240
Penjualan Restaurant		102	255	408	408	408	408	408	408	408	408
Total Kas Masuk		2.658	6.645	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632
Arus Kas Keluar											
Investasi Awal	22.409										
Biaya Operasional											
Gaji Pegawai	0	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
Biaya Pemeliharaan	0	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739
Biaya Restaurant	0	31	77	122	122	122	122	122	122	122	122
Biaya Penjualan & Adm	0	27	27	66	106	106	106	106	106	106	106
Total Kas Keluar	22.409	2.583	2.628	2.714	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754
Aliran Kas Netto	-22.409	75	4.017	7.918	7.878	7.878	7.878	7.878	7.878	7.878	7.878
Akumulasi Kas Netto	-22.409	-22.334	-18.317	-10.399	-2.521	5.357	13.235	21.112	28.990	36.868	44.746

Sumber: BKPM (data diolah)

Tabel III-14 Proforma Profitability

Uraian	Suku Bunga	Tahun										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Disc. Arus Kas Bersih	12%	-22.409	67	3.202	5.636	5.007	4.470	3.992	3.563	3.182	2.841	2.536
Disc. Arus Kas Masuk	12%	0	2.373	5.297	7.568	6.757	6.033	5.387	4.809	4.294	3.834	3.423
Disc. Arus Kas Keluar	12%	-22.409	-2.306	-2.095	-1.932	-1.750	-1.563	-1.395	-1.246	-1.112	-993	-887



Benefit/Cost Ratio (i=12%)	1,32
NPV (i=12%, Juta Rupiah)	12.086,84
IRR (i=12%)	21,49%
Payback Period (tahun)	4,68

Sumber: BKPM (data diolah)

■ Disc. Arus Kas Masuk ■ Disc. Arus Kas Keluar — Akumulasi Kas Netto

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Analisis Ekonomi Regional

1. Perkembangan perekonomian Provinsi Jambi di triwulan III 2021 memiliki capaian yang cukup baik. Pada periode ini Provinsi Jambi berhasil keluar dari jurang resesi dan membukukan pertumbuhan 2,52% (c-to-c) dengan total PDRB sebesar 58.167,74 Miliar. Ekspor impor mulai tumbuh pada saat ini dengan nilai ekspor sebesar 2.012,51 Juta USD dan Impor sebesar 15.57 Juta USD;
2. Dari sisi Produksi, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih tetap menjadi andalan sektor produksi dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 32% dengan laju pertumbuhan sebesar 5,89% (y-on-y). Sektor ini cukup stabil dan terus menunjukkan tren perbaikan seiring dengan stabilnya harga sawit, peningkatan produksi kelapa sawit, serta peningkatan yang signifikan pada produksi serta ekspor pinang dan kopi;
3. Kontribusi dari sektor Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor Netto dan PMTB mendominasi PDRB menurut pengeluaran Provinsi Jambi dengan kontribusi masing 44% ; 25% ; dan 21%. Namun disisi lain ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sektor Konsumsi dan Aktifitas Ekspor-Impor ini memberikan sebuah risiko baru dimana pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar. Ketika pasar dalam kondisi baik maka ekonomi dapat tumbuh sangat tinggi dan sebaliknya ketika kondisi pasar memburuk maka ekonomi dapat terjun bebas;
4. Tantangan yang juga masih harus diselesaikan adalah bagaimana membuka lapangan kerja baru karena tingkat pengangguran terbuka saat ini masih cukup tinggi di angka 4,76% dari target 2,8%. Selain itu, Gini Ratio juga sedikit mengalami peningkatan menjadi 0,321 dari sebelumnya 0,316. Padahal Gini Ratio ditargetkan hanya di angka 0,3. Namun berita baiknya tingkat inflasi masih sangat terjaga dengan di level 2,04% dari target 3% yang telah ditetapkan dan nilai ini sedikit diatas tingkat inflasi Nasional yang berada di angka 1,6%.

Analisis Fiskal Regional

1. Peran fiskal pemerintah pada periode ini mulai memperlihatkan pertumbuhan yang menggembirakan. Meskipun Pendapatan Negara turun 13,07% dari tahun lalu, namun capaiannya terhadap target sangat baik. Capaian penerimaan telah mencapai 4.202,59 Miliar (78,86%), sedangkan realisasi belanja mencapai 14.490,49 Miliar (70,83%). Belanja Modal menjadi belanja dengan pertumbuhan signifikan pada periode ini dan memberikan kontribusi yang cukup besar;
2. Dengan capaian pendapatan dan belanja tersebut, APBN mengalami defisit sebesar 10.287,90 Miliar. Defisit ini turun 2,55% dari tahun lalu yang mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan Provinsi Jambi terhadap daerah lain sedikit berkurang;
3. Pertumbuhan Realisasi APBD juga mengalami penurunan dari tahun lalu sebesar 7%.

Namun kabar baiknya, capaian PAD meningkat 14% dengan total sebesar 2.010,35 Miliar (69%), sementara total pendapatan adalah sebesar 10.764,35 Miliar. Dari sisi belanja APBD tidak mengalami penurunan yang cukup berarti dengan total belanja sebesar 9.098,20 Miliar;

4. Dengan capaian pendapatan dan belanja tersebut, APBD mengalami surplus sebesar 1.666,15 Miliar. Surplus ini turun 29% dari tahun lalu yang disebabkan lambannya realisasi belanja padahal capaian PAD tumbuh cukup baik. Surplus itu kemudian ditambah lagi dengan Pembiayaan Netto sebesar 689,23 Miliar yang sebagian besar berasal dari SILPA tahun lalu sehingga pada periode ini APBD memiliki SILPA sebesar 2.355,47 Miliar.

Peran Fiskal Untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan

1. Pada periode ini, nilai tukar petani juga terus mengalami perbaikan dan meningkat di level 130,94 jauh berada NTP Nasional yang hanya 105,71. Nilai Tukar Nelayan juga mengalami perbaikan di angka 111,44 jauh diatas NTN Nasional yang hanya 105,60;
2. Sepanjang tahun ini nilai NTP selalu bertahan diatas 100 poin. Beberapa sektor unggulan sudah mengalami tingkat nilai tukar yang sangat baik atau di atas 100 poin. Sektor-sektor tersebut antara lain Tanaman Perkebunan Rakyat dengan NTP 131,57, Peternakan 102,43, dan Perikanan Tangkap dengan NTP 114,02. Trend ini seiring dengan stabilnya harga sawit, peningkatan produksi kelapa sawit, serta peningkatan yang signifikan pada produksi serta ekspor pinang dan kopi;
3. Untuk sektor tanaman pangan dengan nilai NTP 97,44 masih belum mampu menembus angka di atas 100. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh menumpuknya hasil panen yang tidak terserap oleh pasar. Begitu juga dengan sektor Holtikultura dengan NTP 97,32. Sektor ini belum mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah karena minimnya petani yang bergerak disektor ini, harga jual yang belum bersaing dan juga kondisi alam yang kurang mendukung untuk pengembangan bibit-bibit unggulan yang mampu memenuhi permintaan pasar;
4. Peran fiskal melalui alokasi belanja dekonsentrasi sektor pertanian pada OPD Pemerintah Daerah dialokasikan sebesar 50% lebih dari total pagu untuk kegiatan pembinaan kelompok masyarakat serta sarana pengembangan Kawasan. Dari belanja output strategis di Kementerian Pertanian, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 47 Miliar Rupiah untuk kegiatan dan program pengembangan sektor pertanian dengan total realisasi sudah mencapai 39,43 Miliar Rupiah (84%). Dengan capaian output-output diatas 70% bahkan beberapa sudah mencapai 100%. Optimalnya pelaksanaan belanja di Kementerian Pertanian ini tentunya akan sangat mengurangi beban para petani baik beban dari sisi produksi maupun beban dalam distribusi;
5. Selain dana yang dialokasikan pada K/L dan OPD, Pemerintah juga mendorong sektor pertanian dan perikanan melalui bantuan permodalan dalam bentuk subsidi bunga pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari data penyaluran KUR 2020-2021, kedua sektor ini merupakan sektor yang paling merasakan manfaat dari KUR itu sendiri dengan porsi lebih

dari 50% baik dari jumlah debitur maupun jumlah penyaluran. Skema KUR Supermi mengalami lonjakan yang luar biasa baik di sektor pertanian maupun perikanan. Limit pinjaman yang kompetitif serta syarat yang mudah membuat banyak debitur memanfaatkan fasilitas tersebut;

6. Untuk Nilai Tukar Nelayan terus menunjukkan tren perbaikan dengan NTN 111,44, meningkat dibanding nilai tahun lalu. Peningkatan tersebut terjadi baik untuk perikanan tangkap maupun budidaya. Hal yang cukup menggembirakan adalah perikanan budidaya mulai menunjukkan perkembangan yang baik dimana para peternak ikan mulai dapat menikmati hasil budidaya ikannya. Hal ini sangat penting karena pada periode-periode sebelumnya perikanan budidaya sejak awal tahun selalu berada pada index dibawah 100. Dengan kata lain, hasil produksi tidak cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan. Sedangkan pada periode ini, meskipun hanya sedikit, namun setidaknya hasil budidaya ikan setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan para pembudidaya;
7. Peran alokasi DAK Fisik sektor pertanian dan perikanan juga sangat penting untuk menekan biaya produksi hasil tani dan nelayan. Selain pembangunan sarpras di sektor pertanian, alokasi pada Bidang Kelautan dan Perikanan juga difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pembenihan dan untuk alat penangkapan ikan baik dari kapalnya hingga alat tangkapnya.

Peluang Investasi Daerah

1. Berdasarkan hasil analisis kelayakan awal, proyek pengembangan Danau Kerinci termasuk kategori layak investasi berdasarkan indikator-indikator yang sudah disebutkan;
2. Pemerintah Kabupaten Kerinci dimungkinkan untuk melakukan Pinjaman Daerah untuk membiayai proyek pengembangan pariwisata tersebut dengan syarat melakukan penghematan dan rasionalisasi kembali terhadap nilai proyek agar mampu memenuhi angka DSCR sebagaimana simulasi yang telah dilakukan sebelumnya.

4.2. Rekomendasi

1. Pada Triwulan III 2021 ini, realisasi APBN sedikit dibawah target yang diharapkan yaitu 70%. Namun secara umum seluruh jenis belanja mengalami perbaikan dari persentase belanja dari tahun lalu. Dengan kata lain, hingga periode ini sudah terlihat proses percepatan belanja yang dilakukan oleh K/L. Namun yang cukup disayangkan adalah beberapa output yang sifatnya pengadaan apalagi untuk alat kesehatan yang tentunya memiliki tingkat urgensi cukup tinggi masih banyak yang belum terealisasi dan progress yang masih sangat rendah. Padahal seharusnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti ini seharusnya dapat dipercepat untuk direalisasikan sejak awal tahun sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu direkomendasikan satker-satker KL untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran;
2. Demikian halnya juga dengan APBD dimana total penyerapan anggaran masih sangat rendah. Untuk dapat memberikan kontribusi yang optimal pada program pemulihan ekonomi,

sangat penting bagi OPD penerima APBD di Provinsi Jambi untuk secara maksimal melaksanakan program dan kegiatan yang ada agar anggaran yang telah disediakan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu direkomendasikan OPD Pemda di Provinsi Jambi untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran;

3. Untuk Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan, kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a) Sanksi terhadap Pelanggar Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

Kami **merekomendasikan** agar Pemerintah membuat penyesuaian atas kebijakan harga dan membuat sanksi yang jelas bagi pelanggar. Dengan adanya pemberian sanksi ini diharapkan kebijakan harga yang dibuat dapat memberikan jaminan bagi petani agar hasil panennya mendapatkan harga yang layak. Selain itu, dengan adanya sanksi ini dapat menjadi *benchmark* bagi Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap komoditas penting lainnya seperti jagung, kedelai, cabai merah dan bawang merah yang memiliki dampak besar terhadap inflasi di Provinsi Jambi.

b) Peningkatan Edukasi Bisnis Pertanian

Kami merekomendasikan agar para petani diberikan wawasan bisnis yang cukup agar kedepannya para petani dapat menjaga komitmen bisnis serta mampu melihat berbagai peluang-peluang yang ada salah satunya dengan memanfaatkan pasar digital yang sedang menjamur saat ini. Pemerintah Daerah juga dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar para petani diberikan edukasi inklusi keuangan yang cukup agar tingkat literasi keuangan para petani semakin meningkat. Tingkat literasi keuangan yang tinggi tentunya akan mempermudah petani untuk memperoleh pendanaan maupun memperoleh kemudahan dengan banyaknya metode pembayaran yang tersedia saat ini.

c) Pengalokasian Dana Cadangan Khusus Pertanian

Kami merekomendasikan agar pemerintah membuat kebijakan khusus untuk mengalokasikan secara tetap terkait pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Hal ini didasarkan bahwa sektor ini merupakan komponen terbesar pembentuk PDRB Provinsi Jambi dan secara konsisten memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian. Kami mendorong agar Pemerintah membuat kebijakan yang mendukung perkembangan para petani di Daerah. Salah satunya dengan menyediakan dana cadangan khusus yang dipersiapkan untuk membeli hasil pertanian yang tidak laku dipasaran baik karena maraknya bantuan sosial yang diberikan maupun karena sebab-sebab lain seperti tingginya impor, musim panen raya yang bersamaan dan hal-hal lain sebagainya.

d) Perluasan Pasar dan Promosi

Kami merekomendasikan agar pemerintah turut serta dalam menyediakan *demand* tersebut baik melalui kebijakan di Internal maupun eksternal. Selain itu, dapat juga diberikan bantuan promosi serta mengadakan kegiatan pameran dagang, festival tani nelayan atau event tertentu yang dapat menjadi trigger bagi komoditas hasil pertanian dari Provinsi Jambi.

e) Alokasi dan Eksekusi Anggaran Berbasis Data (*Data Driven*)

Kami merekomendasikan agar kebijakan pengalokasian dana yang tersedia berbasis data dan informasi pertanian/perikanan. Misalnya alokasi dana untuk penyuluh pertanian difokuskan pada desa yang menjadi sentra produksi dan penghasil komoditi, serta pengembangan varietas unggul tanaman hortikultura yang memiliki pangsa pasar yang potensial. Di samping itu, *timing* eksekusi/realisasi anggaran agar memperhatikan kondisi ekonomi regional, inflasi, ketersediaan stok pangan, kondisi pasar komoditi, serta perkembangan harga komoditi level global. Salah satu peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku Regional Chief Economist yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemda adalah forum Aset Liability Committee (ALCO) Regional.

f) Pemanfaatan Jasa Resi Gudang

Pemerintah dapat melindungi petani dari perubahan harga yang berfluktuatif dengan memanfaatkan lembaga penjaminan resi gudang. Melalui sistem resi gudang, petani tidak harus menjual komoditasnya pada saat panen. Komoditas hasil panen dapat disimpan terlebih dahulu di dalam gudang dan baru dijual ketika harganya lebih kompetitif. Di samping itu resi Gudang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank dengan skema subsidi bunga yang memungkinkan petani memperoleh pendanaan untuk memulai kembali usaha taninya.

4. Pemerintah Kabupaten Kerinci dapat melakukan perhitungan kembali nilai proyek agar berada pada kisaran 19,7 s.d Rp 21,5 milyar. Seandainya angka yang digunakan adalah angka perhitungan awal, maka Pemkab Kerinci harus mampu meningkatkan PAD sehingga tetap menghasilkan DSCR lebih dari 2,5. Dengan perhitungan tersebut, Pemkab Kerinci dapat mengajukan skema investasi langsung dalam bentuk pemberian pinjaman.

LAMPIRAN

Lampiran I Pagu dan Realisasi Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian di Provinsi Jambi Tahun 2021

Satker	Output	Pagu	Real	%	Porsi
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Data dan Informasi Publik	0,72	0,53	74%	28%
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7,35	6,83	93%	26%
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	0,40	0,29	74%	13%
	Koordinasi	0,31	0,23	75%	5%
	Pengawasan dan Pengendalian Produk	0,24	0,13	52%	4%
Dinas Perkebunan Propinsi Jambi	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	0,83	0,63	76%	3%
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,19	0,17	87%	3%
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	Data dan Informasi Publik	0,08	0,03	39%	3%
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	0,53	0,46	85%	2%
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	6,77	5,21	77%	2%
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	0,42	0,25	60%	2%
	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	0,36	0,07	19%	2%
	Koordinasi	0,40	0,26	65%	2%
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	0,66	0,47	72%	1%
	Layanan Perkantoran	0,31	0,23	73%	1%
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	0,01	0,01	94%	1%
	Pelayanan Publik kepada masyarakat	0,04	0,03	82%	1%
	Pelayanan Publik Lainnya	0,04	0,03	91%	1%
	Pemantauan produk	0,94	0,77	82%	0%
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,06	0,05	90%	0%
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,52	0,31	60%	0%
	Sarana Pengembangan Kawasan	3,44	2,87	83%	0%
Sertifikasi Produk	1,18	0,96	81%	0%	
Grand Total		25,79	20,82	81%	100%

**Lampiran II Output Strategis Sektor Pertanian pada Kementerian
Pertanian Tahun 2021**

K/L	KRO	RO	Uraian RO	Satuan	Target	Capaian	% Output	Pagu (Miliar)	Real (Miliar)	% Rp	
Kementerian Pertanian	CAG	001	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Unit	80	70	94	3,46	3,06	88	
	CAI	015	Benih Sebar Umbi /Rimpang Hortikultura	Unit	20	6	97	1,02	1,01	99	
		611	Kawasan Kedelai	Unit	3.200	7	82	5,35	4,35	81	
	PDC	500	Sertifikasi Karantina Pertanian	Sertifikat	7.354	2.805	52	1,68	0,93	55	
	QAA	001	e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	orang	117.757	73.081	76	1,98	1,24	144	
	QAH	001	Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi	Layanan	2	2	80	1,15	0,73	139	
	QDC	001	Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian	orang	941	1	66	6,77	4,45	66	
	QEH	001	Optimalisasi Reproduksi	Klp Masyarakat	3.691	3.334	97	0,79	0,76	96	
	RAI	001	Area penyaluran benih padi	Unit	20.580	32.160	100	2,88	2,88	100	
		002	Area penyaluran benih jagung	Unit	6.236	11.236	100	3,93	3,93	100	
		010	Kawasan Bawang Merah	Ha	30	29	99	0,21	0,21	99	
		011	Kawasan Aneka Cabai	Ha	100	88	89	1,18	1,04	89	
		621	Kawasan Padi	Unit	418	422	100	0,57	0,57	100	
	RBK	001	Asuransi Pertanian	Unit	2	2	55	0,18	0,08	111	
		001	Irigasi Perpipaan (PEN)	Unit	6	5	95	0,60	0,57	95	
		002	Asuransi Usaha Ternak	Unit	1	2	73	0,02	0,01	73	
		002	Embung Pertanian (PEN)	Unit	9	8	93	1,08	1,01	93	
		U93	Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (PEN)	Unit	7	6	90	0,89	0,80	90	
	RBO	002	Optimasi Lahan (PEN)	km2	0	0	65	2,28	1,48	65	
	RDK	001	Jaringan Irigasi Tersier (PEN)	Unit	140	131	94	10,50	9,89	94	
	SDA	502	Diseminasi Teknologi Pertanian	Teknologi	4	2	89	0,48	0,43	88	
	Total								47,00	39,43	84



Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi

Jl. M. Yoesoef Singadikane No. 45 Telanaipura Kota Jambi 36122

Telp. (0741) – 668802 | Fax (0741) – 668801

Email : kanwil.jambi@gmail.com

Website: djpb.go.id/kanwil/jambi